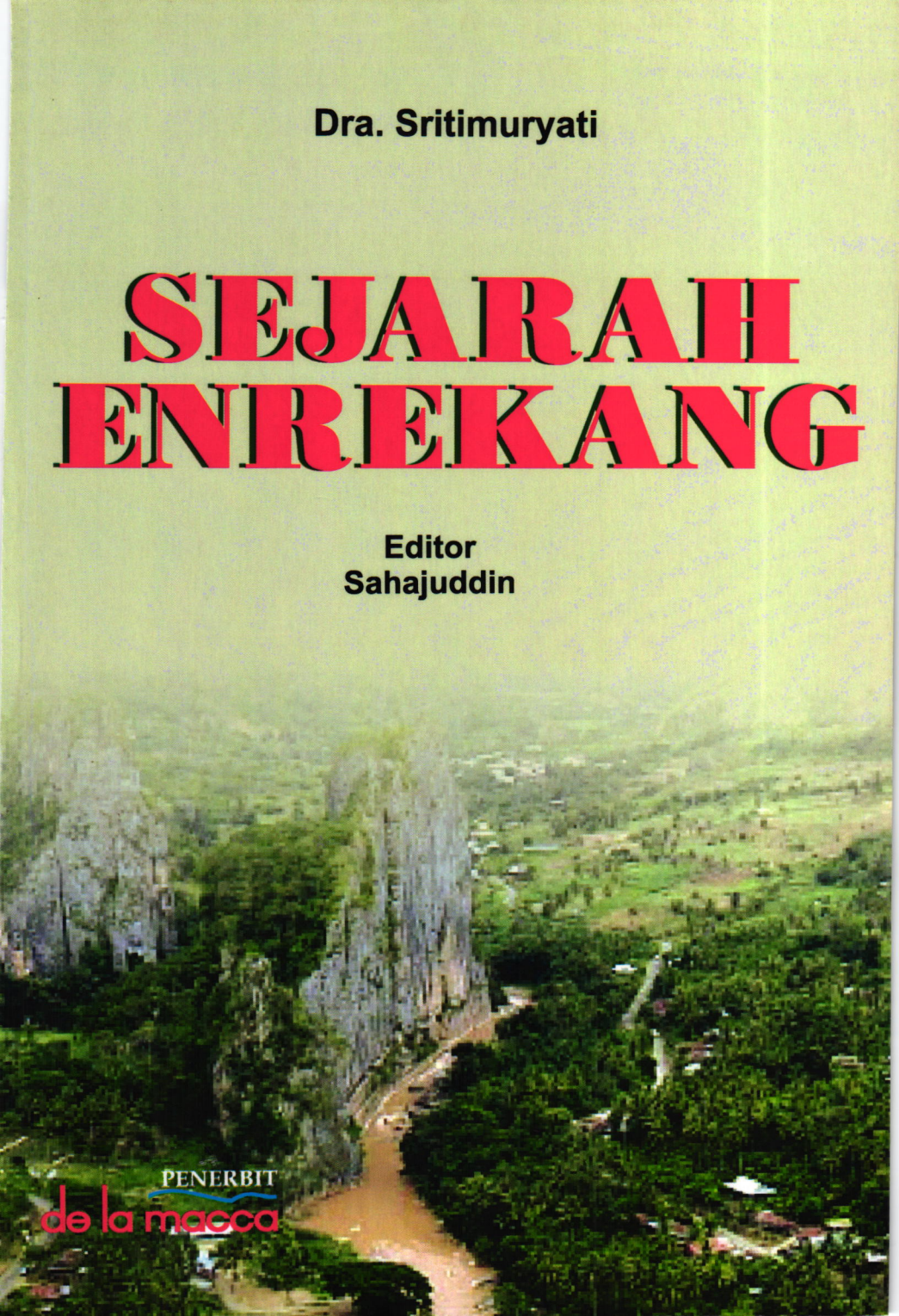


Dra. Sritimuryati

SEJARAH ENREKANG

**Editor
Sahajuddin**

PENERBIT
de la macca



SEJARAH ENREKANG

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaanm dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat satu (1) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
2. barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DRA. SRITIMURYATI

SEJARAH ENREKANG

**Editor
Sahajuddin**

**Penerbit
De Lamacca**

SEJARAH ENREKANG

© Dra. Sritimuryati

Penulis

Dra. Sritimuryati

Editor

Sahajuddin

Desain Cover

Welsy .G.Andries, S.Kom

Layout

Friska Rifai

Foto Cover

Goggle

Cetakan I, September 2013

Penerbit

De La Macca

(Anggota IKAPI Sulsel No.007/SSL/03)

Jln. Borong raya No. 75 A Lt. 2 Makassar 90222

Telp. 0411-2410294 - 0811468957 -08114124721

Email : de.lamacca@yahoo.com

Hak cipta dilindungi oleh Undang - Undang.

Dilarang mengutip isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan Penerbit.

ISSBN: 978-602-263-18-0

PENGANTAR PENERBIT

De Lamacca, sebagai lembaga penerbitan anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) sejak tahun 2000, telah banyak menerbitkan buku-buku kearifan lokal yang ditulis oleh penulis di nusantara, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kesempatan ini kami berbangga dapat menerbitkan **Buku SEJARAH ENREKANG**, Penulis Dra. Sritimuryati. Dengan terbitnya buku ini, tak dapat dipungkiri, bahwa telah memperkaya ragam kearifan lokal di provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk itu pada kesempatan ini, penerbit de lamacca mengucapkan terimakasih kepada Sritimuryati yang telah mempercayakan penerbitan buku ini. Semoga kepercayaan semacam ini dapat terus terbina hingga di masa-masa datang.

Buku SEJARAH ENREKANG ini sudah berada di tangan pembaca yang budiman, selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Goenawan Monoharto

Direktur Penerbit De Lamacca

KATA PENGANTAR EDITOR

Oleh : Sahajuddin ¹

Penulisan sejarah Indonesia khususnya Sulawesi Selatan dalam konteks sejarah nasional masih sangat terbatas pada Kerajaan Gowa dan Bone, padahal di wilayah ini memiliki kerajaan yang sangat banyak. Salah satu kerajaan yang dimaksud adalah Kerajaan Enrekang. Di mana Enrekang dalam konstelasi politik dan pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang, Enrekang selalu dijadikan benteng pertahanan yang strategis dari serangan musuhnya sebagai negara kolonialis, namun belum banyak diteliti dan ditulis. Bukan hanya itu, tetapi hampir semua segmen nilai-nilai historis di daerah ini nyaris tidak banyak diteliti dan ditulis.

Kenyataan itu yang menjadi keprihatinan banyak pihak, khususnya ibu Sritimuryati sebagai salah satu staf peneliti bidang kesejarahan pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keprihatinan itu, ia wujudkan dalam penelitian dan penulisan sejarah daerah Enrekang. Dan saya kira adalah suatu langkah yang tepat untuk mengungkapkan salah satu sejarah daerah di Sulawesi Selatan yang masih minim diungkapkan karena Sulawesi Selatan memiliki kerajaan-kerajaan lokal yang sangat banyak tetapi belum banyak diungkapkan.

Rekonstruksi sejarah, termasuk sejarah Sulawesi

¹Sahajuddin adalah staf peneliti di Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Selatan pada umumnya dan daerah-daerah di wilayah ini pada khususnya syarat dengan berbagai gejolak sepanjang zaman yang banyak diberkan sebagai nilai kelampauan Sulawesi Selatan. Mulai dari zaman mitologis sampai zaman kontemporer atau zaman revolusi fisik diwarnai konflik-konflik dan perlawanan yang sangat sengit terhadap bangsa-bangsa asing. Maka dengan demikian penulisan sejarah lokal di Sulawesi Selatan, khususnya periode-periode integrasi awal kerajaan tidak bisa dipisahkan dengan konsep mitologis. Berdasarkan proses kelampauan kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan yang selalu dihubungkan dengan mitologis yang disebut dengan To Manurung. To Manurung inilah yang dianggap sebagai peletak dasar kerajaan yang terintegrasi secara internal dari kerajaan itu. Adanya proses integrasi ini akan menunjukkan situasi dan kondisi politik berdasarkan zamannya.

Secara historis Enrekang, merupakan salah satu kerajaan yang lahir dan berkembang pada abad XIV. Walaupun pada masa itu, Enrekang lebih terkenal dengan sebutan Massenrempulu. Massenrempulu menurut harfiahnya dan menurut pemahaman bahasa lokalnya diartikan daerah-daerah pinggiran gunung atau daerah-daerah yang menyusuri gunung. Adapun daerah-daerah yang ada di pinggiran gunung adalah Enrekang, Maiwa, Duri, Kassa dan Batulappa. Lima daerah ini adalah kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri dan membentuk suatu persekutuan yang disebut Massenrempulu sebagaimana disebutkan di atas. Arti Massenrempulu-lah yang mengikat lima daerah tersebut sebagai salah satu kerajaan yang terbentuk berdasarkan persekutuan.

Tujuannya tidak lain karena memiliki geografis yang sama dan saling berdekatan satu sama lain sehingga disebut

Massenrempulu. Alasan kedua karena pada abad XV sampai abad XVII awal adalah masa-masa pembentukan diri, sebab pada masa itu ada tiga kerajaan yang gencar memperluas dan mempertahankan kerajaannya. Adapun tiga kerajaan yang dimaksud adalah Kerajaan Luwu, Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Sehingga kerajaan-kerajaan lain berusaha mempertahankan diri dengan cara membentuk persekutuan seperti Massenrempulu. Kabupaten Enrekang adalah salah satu kerajaan di Sulawesi Selatan yang terdiri dari lima kerajaan kecil yaitu: Enrekang, Maiwa, Duri, Kassa dan Batulappa. Kerajaan ini didirikan oleh Tinriangka, salah satu keturunan Tomanurung Palipadda atau Embong Bulan dari Palli Positana Kaluppini.

Namun dalam perkembangannya Kerajaan Massenrempulu sebagai kerajaan yang mengikat diri sebagai kerajaan gabungan dari lima kerajaan. Lama kelamaan Massenrempulu semakin meredup dan Enrekang-lah yang lebih populer. Kepopuleran Enrekang dan peranan tokoh-tokohnya yang menggeser Massenrempulu sebagai bentuk kesatuan yang mengikat lima kerajaan atau daerah yang ada disekitarnya. Pergeseran Massenrempulu dan menjadi Enrekang dianggap wajar karena tidak mengurangi nilai-nilai yang terkandung pada Massenrempulu sebagai gabungan dari daerah-daerah pinggiran gunung. Sebab kata Enrekang sendiri berasal dari Endeg yang artinya Naik dari atau Panjat yang merupakan asal mulanya sebutan Endekan (Enrekang), jadi Enrekang juga mengacu pada daerah-daerah pegunungan.

Buku yang ada dihadapan anda ini yang ditulis oleh ibu Sritimuryati berusaha mengungkapkan sejarah Enrekang secara menyeleruh karena scop temporalnya sangat panjang. Penulisan sejarah Daerah Enrekang ini waktunya cukup panjang yakni mulai dari abad XV ditandai dengan berdirinya

kerajaan-kerajaan lokal sampai pada waktu terbentuknya kabupaten tahun 1960 atau abad XX. Kurun waktu yang cukup panjang ini selama kurang lebih 500 tahun secara rinci dibagi dalam beberapa masa. Masing-masing adalah masa kerajaan lokal, masa pemerintahan Jepang, dan masa revolusi fisik hingga terbentuknya Kabupaten Enrekang. Di sini terlihat betah besarnya harapan penulis untuk menyuguhkan tulisan yang begitu panjang rentang waktunya dari sejarah daerah Enrekang yang memang belum banyak ditulis.

Harus diakui bahwa buku ini banyak memberikan informasi penting tentang daerah Enrekang pada masa lampu. Tetapi harus juga diakui bahwa buku ini belum tuntas penkajiannya pada setiap pembabakan yang dilakukan oleh penulis, tetapi sudah sangat berhasil ia rentangkan setiap pembabakan tersebut. Mulai pada masa Tomanurung, masa berdiri kerajaan-kerajaan lokal sampai masuk negara kolonialis seperti Belanda dan Jepang. Pada masa pemerintahan Jepang di daerah Enrekang semua kegiatan-kegiatan pemerintahan Belanda dan Jepang tidak mengalami perubahan. Tidak ada pergantian pejabat sehingga pejabat-pejabat lokal yang dipakai pada masa pemerintahan Belanda tetap menjalankan tugasnya pada masa pemerintahan Jepang. Walaupun terjadi pengangkatan pejabat-pejabat lokal, maka tentara Jepang tidak terlalu berperan, karena yang berperanan di sini ialah hanya Tomatua-Tomatua kampung (penasehat dalam pemerintahan) yang terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan masyarakat.

Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Arung/Puang, dan wakilnya disebut Sullewatang, sementara yang mengurus pelaksanaan pemerintahan dan urusan peradilan disebut pabbicara. Sekalipun kekuasaan tertinggi di tangan Arung

atau Puang namun dalam hal ini Tomatua-Tomatua kampung sangat besar peranannya.

Sekalipun latihan penggemblengan pemuda-pemuda di Enrekang dipersiapkan untuk kepentingan pertahanan Jepang di dalam menghadapi sekutu misalnya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa latihan-latihan tersebut menjadi modal pengalaman yang sangat penting bagi pemuda-pemuda di daerah Enrekang untuk memperkuat kesatuan-kesatuan kelaskaran di dalam menghalau musuh penjajah yang datang ke daerah ini. Dengan pengalaman itu, yang kemudian hari Di Sulawesi Selatan, rakyatnya bangkit menyusun kekuatan.

Itulah sebabnya ketika Indonesia merdeka dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia melalui sekutu dengan NICA sebagai pegawai administrasi Belanda sehingga rakyat Indonesia bangkit dengan caranya sendiri. Hal itu terjadi karena sekutu memberi kesempatan kepada NICA mempersenjatai bekas KNIL (Koninklijk Negerlandsche Leger), yang pernah disekap oleh Jepang awal Oktober 1945. Tindakan sekutu ini sesungguhnya telah diperhitungkan oleh pemimpin pemuda militan. Sebelum sekutu mendarat di Pelabuhan Makassar. Manai Sophian diminta untuk berunding dengan pimpinan Jepang dalam hal penyerahan senjata, namun tidak demikian halnya yang terjadi. Beliau amat dekat dengan Dr. Ratulangi yang cenderung pada perjuangan diplomasi ketimbang perjuangan atau perlawanan bersenjata. Sikapnya ini dapat dipahami berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang ada pada pemuda yang tidak memiliki senjata yang riil, serta latihan yang jauh lebih sempurna dibandingkan dengan pasukan sekutu.

Studi ini juga sangat menarik karena mengungkapkan dan menjelaskan beberapa pertempuran yang dilakukan oleh

para pemuda dan masyarakat Enrekang dengan pihak Belanda pada masa revolusi fisik. Di mana, beberapa bulan menjelang sebelum tentara memasuki daerah Enrekang, para pemuda pejuang seperti Abdul Rahman Kulau, Abu Bakar Lambogo dan Hamid Aly selalu melakukan konsolidasi sehingga sering mengunjungi dari kampung yang satu ke kampung yang lain dalam wilayah Enrekang. Tujuan kunjungan ini adalah untuk menyerukan kepada masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan, karena diperkirakan Belanda akan kembali ke daerah Enrekang. Di setiap kampung yang didatangi para pemuda berjuang bersama pengikutnya dengan semangat yang menggebu menyatakan bahwa mereka akan menentang kedatangan Belanda atau NICA.

Di samping itu, dalam studi yang dilakukan oleh Sritimuryati ini mengungkapkan bagaimana para pemuda Enrekang itu membentuk sebuah wadah perjuangan untuk mengimbangi pergerakan NICA Belanda. Pada tanggal 27 September 1946 dibentuk pula BPRI (Badan Perjuangan Rakyat Indonesia) oleh Abubakar Lambogo, Andi Babba, dan Husain di rumah Andi Babba di Kampung Bamba. Laskar BPRI pada waktu itu dengan cepat melebarkan sayapnya ke kampung-kampung Duri dan Maiwa. Dengan terbentuknya organisasi ini maka era perjuangan secara terorganisir mulai dilancarkan untuk membendung kekuatan NICA atau Belanda. Demikianlah buku ini, sehingga layak untuk dibaca.

Makassar, 10 September 2013

Editor,

Sahajuddin

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	i
KATA PENGANTAR EDITOR	ii
DAFTAR ISI	viii

BAB I

PENDAHULUAN	1
1. Latar Penelitian	1
2. Perumusan Masalah	3
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
4. Ruang Lingkup Penelitian	5
5. Tinjauan Pusaka	5
6. Metode Penelitian	7
7. Sistematika Laporan Penulisan	8

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH	
KABUPATEN ENREKANG	11
1. Asal Usul Penanaman Wilayah	11
2. Letak dan Keadaan Alam	11
3. Penduduk dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	13
4. Sistem Agama dan Kepercayaan	20

BAB III SEJARAH PERKEMBANGAN

DAERAH KABUPATEN ENREKANG	25
1. Masa kerajaan-kerajaan Enrekang	25

2. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda	35
3. Masa Pemerintahan Jepang	39
4. Masa Revolusi Fisik Hingga Terbentuknya Kabupaten Enrekang	49
BAB IV	
PENUTUP	85
1. Kesimpulan	85
2. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
DATA INFORMAN	94

PENGANTAR PENERBIT

De Lamacca, sebagai lembaga penerbitan anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) sejak tahun 2000, telah banyak menerbitkan buku-buku kearifan lokal yang ditulis oleh penulis di nusantara, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kesempatan ini kami berbangga dapat menerbitkan **Buku SEJARAH ENREKANG**, Penulis Sritimuryati. Dengan terbitnya buku ini, tak dapat dipungkiri, bahwa telah memperkaya ragam kearifan lokal di provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk itu pada kesempatan ini, penerbit de lamacca mengucapkan terimakasih kepada Sritimuryati yang telah mempercayakan penerbitan buku ini. Semoga kepercayaan semacam ini dapat terus terbina hingga di masa-masa datang.

Buku SEJARAH ENREKANG ini sudah berada di tangan pembaca yang budiman, selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Goenawan Monoharto

Direktur Penerbit De Lamacca

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1

DAFTAR PUSTAKA	91
DATA INFORMAN	94

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Penelitian

Berbicara tentang sejarah, maka kita secara langsung diperhadapkan kepada realitas sosial yang pada dasarnya selalu berkenaan dengan suatu kejadian atau peristiwa di masa lampau dalam hubungannya dengan tindakan seorang pelaku sejarah. Demikian pengertian sejarah selalu menyangkut peristiwa sosial yang benar-benar terjadi pada waktu dan tempat tertentu di masa yang telah lampau (Pananrangi Hamid, 1991 : 3)

Penelitian ini akan difokuskan kepada peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan masyarakat manusia di suatu wilayah tertentu yang di sebut Kabupaten Enrekang. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan anekaragam kejadian yang di dalamnya terkandung perubahan sosial, terutama karena akibat watak masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang menurut spesifikasinya yang berbeda-beda dalam setiap fase sejarah tertentu, sejak masa kerajaan-kerajaan lokal di daerah Enrekang sampai dengan masa revolusi fisik, hingga terbentuk kabupaten.

Kabupaten Enrekang sebagai sasaran penelitian merupakan salah satu di antara 26 kabupaten dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan, dan ibukotanya bernama Enrekang, terletak pada km. 235 dari ibukota provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian dan penulisan ini belum pernah ditulis dalam bentuk laporan penelitian, yang ada hanya sejarah Gowa, sejarah Bone dan sejarah Wajo yang ditulis oleh Abdul Rasak Daeng Patunru, namun dalam penyajiannya tidak dipaparkan mengenai masa Jepang dan masa revolusi fisik. Jadi dalam penulisan sejarah daerah Enrekang ini berbeda dengan ketiga penulisan sejarah tersebut di atas.

Pengungkapan sejarah Daerah Enrekang yang merupakan salah satu bagian dari sejarah daerah Sulawesi Selatan, dan selanjutnya pula merupakan salah satu unit dari sejarah nasional yang memiliki satu masa lampau yang perlu ditulis dalam satu laporan penelitian, sebagaimana halnya daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan telah melalui suatu proses pertumbuhan dan perkembangan sejarah yang cukup panjang, sehingga usaha penelusuran kembali gagasan-gagasan vital, nilai-nilai dan tradisi budaya daerah yang melatarbelakangi seluruh aktivitas sosial dari masyarakat pendukungnya bagaimanapun juga memerlukan adanya sorotan perhatian yang berfokus kepada setiap fase sejarah sejak masa kerajaan-kerajaan lokal hingga terbentuknya Kabupaten.

Adapun dalam penulisan laporan ini sebenarnya masih merupakan bahan deskriptif semata-mata, sebab masih ditemukan beberapa hal yang sifatnya masih sangat mentah sekalipun telah diusahakan untuk menemukan persyaratan ilmiah yang dituntut sesuai dengan metode penulisan sejarah.

Perlu diketahui bahwa studi sejarah adalah merupakan salah satu aspek yang amat penting dalam melaksanakan pembangunan bangsa dewasa ini. Karena hasil dari studi sejarah akan dapat mewujudkan suatu universum simbolis yang mampu mengobjektivaskan dan melegitimasi

eksistensi masyarakatnya. Kendatipun demikian sejarah juga berusaha mengungkapkan pesan-pesan dari perjuangan masa lampau yang kelak merangsang dan mendorong pada generasi masa kini demi untuk memperkokoh integritas bangsa dalam membangun masyarakat di segala bidang (Nawir, 1993 : 1).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pengungkapan tentang pengetahuan masa lalu sebenarnya tiada lain dari kelanjutan atau perpanjangan dari masa lampau pula. Sejarah tidak terlepas dari tiga dimensi waktu yakni masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di mana dimensi waktu ini saling terkait satu sama lain, dengan mengerti dan mengetahui masa lalu dan memahami sepenuhnya masa kini, kita dapat merencanakan masa yang akan datang. Sejarah sangat penting untuk dipelajari dalam rangka pembangunan bangsa dan negara.

2. Perumusan Masalah

Adapun rumusan pokok-pokok masalah yang melatarbelakangi usaha serta kegiatan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Belum diketahuinya secara pasti tentang periodisasi sejarah perkembangan Daerah Enrekang sejak masa kerajaan-kerajaan lokal, masa pemerintahan kolonial Belanda, masa pemerintahan Jepang, dan masa revolusi fisik hingga terbentuknya kabupaten.
2. Belum diketahuinya secara mendetail tentang gagasan-gagasan vital yang telah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah kehadiran masyarakat manusia di daerah bersangkutan.
3. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar memerlukan data serta informasi kesejarahan, terutama

dalam rangka fungsionalisasinya sebagai wadah dokumentasi, disamping tugas dan fungsinya sebagai sumber pelayanan data kesejarahan termasuk sejarah daerah-daerah di Sulawesi Selatan.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

Bertolak dari masalah-masalah pokok yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.1.1. Mengkaji dan menganalisa data kesejarahan, khusus yang berkaitan dengan seluruh bidang kehidupan di Kabupaten Enrekang dengan mengambil titik sentrum pada periodisasi sejarahnya dari masa kerajaan lokal sampai dengan masa terbentuk Kabupaten.
- 1.1.2. Tersedianya sebuah naskah yang akan dijadikan bahan dan sumber data informasi kesejarahan khususnya bagi Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar.

3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk :

- 1.1.1. Meningkatkan jumlah dan mutu bahan informasi kesejarahan, khususnya sejarah daerah Enrekang, dan dengan demikian diharapkan akan lebih mempercepat proses peningkatan kesadaran di samping pemurnian sejarah daerah di Sulawesi Selatan.
- 1.1.2. Penyebarluasan informasi kesejarahan khusus berkenaan dengan sejarah daerah Enrekang ke seluruh

lapisan masyarakat daerah Sulawesi Selatan sebagai realisasi pelaksanaan tugas-tugas Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar di bidang informasi dan dokumentasi.

4. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun mengenai ruang lingkup penelitian dan penulisan laporan sejarah Daerah Enrekang ini waktunya cukup panjang yakni mulai dari abad XV ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan lokal sampai pada waktu terbentuknya kabupaten tahun 1960 atau abad XX. Kurun waktu yang cukup panjang ini selama kurang lebih 500 tahun secara rinci dibagi dalam beberapa masa. Masing-masing adalah masa kerajaan lokal, masa pemerintahan Jepang, dan masa revolusi fisik hingga terbentuknya Kabupaten Enrekang.

Sedang ruang lingkup spacialnya terjangkau seluruh wilayah Kabupaten Enrekang yang meliputi 9 kecamatan. Namun tidak tertutup kemungkinan daerah lain akan dijadikan sasaran penelitian sepanjang hal itu ada kaitannya. Ruang lingkup penulisan laporan ini tidak dapat dibatasi secara ketat, mengingat dalam suatu penulisan sejarah di mana peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya kadang-kadang berkaitan.

5. Tinjauan Pustaka

- 5.1 "Massenrempulu menurut catatan D.F Van Braam Morris" yang diterjemahkan oleh H.A.M Mappasanda (1991), menyajikan tentang sejarah federasi Massenrempulu di mana federasi tersebut terdiri atas 5 kerajaan yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu Maiwa, Enrekang, Duri, Kassa, dan Butulappa. Duri juga adalah federasi yang terdiri dari kerajaan

: Malua, Alla, dan Buntu Batu. Federasi ini populer juga disebut Tallu Batu Papan. Mengenai sejarah tertua dari kerajaan-kerajaan di Massenrempulu tidaklah diketahui dengan pasti. Tetapi besar kemungkinan kerajaan-kerajaan (yang tergantung dalam Massenrempulu) dan Tana Toraja pernah di bawah kekuasaan Luwu bersama-sama sampai karena persekutuan kerajaan-kerajaan itu dan juga karena kemunduran dari kerajaan Luwu, mereka mendapat kesempatan dirinya memerdekakan dirinya menjadi kerajaan-kerajaan yang merdeka dan berdaulat penuh dan meningkatkan dirinya membentuk perserikatan atau federasi yang mereka namai Massenrempulu atau dengan bahasa bugis Ma'sinrimpulu yang berarti daerah berdekatan dengan gunung.

Dalam penguraian setiap kerajaan di daerah Massenrempulu, maka dalam buku ini memaparkan beberapa bagian seperti :

- Negeri yang meliputi : batas-batas wilayahnya, keadaan geografisnya, perikanan dan perdagangan.
- Penduduk meliputi : kekerabatan, pelapisan sosial, rumah, pakaian, dan bahasa.
- Pemerintahan yang meliputi : struktur pemerintahan, peradilan dan pendapatan.

5.2 "Sejarah Daerah Soppeng" yang ditulis oleh Pananrangi Hamid (1991) menyajikan tentang beberapa pokok penting meliputi : masa prasejarah dan kedatangan Tomanurung, masa kerajaan lokal sebelum dan sesudah Islam di daerah Soppeng, masa

kompeni Belanda sampai kepada masa kemerdekaan. Di dalam menguraikan masa kerajaan lokal dijelaskan pula mengenai susunan raja-raja dan perkembangan daerah Soppeng sebelum dan sesudah Islam.

- 5.3 “Arus Revolusi 45 di Sulawesi Selatan”, yang ditulis oleh Sarita Pawiloy (1987), menyajikan tentang keberadaan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk kerajaan di Massenrempulu mulai dari awal berdirinya sampai perjuangan dalam revolusi fisik di daerah Massenrempulu. Penelusuran kajian bersifat umum termasuk bagaimana perlawanan raja-raja di Sulawesi Selatan menentang pemerintahan kolonial Belanda. Dalam buku tersebut terungkap pula masalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, yang ditandai dengan pembentukan kekuatan dan badan perjuangan serta perlawanan bersenjata di setiap daerah di Sulawesi Selatan termasuk daerah Massenrempulu.

6. Metode Penelitian

Sejarah sebagai pertanggungjawaban masa lampau dinyatakan dalam wujud jejak-jejak, bekas-bekas, keterangan yang diabadikan dalam bentuk dokumen, maupun kesan yang disampaikan dalam bentuk lisan. Berdasarkan pertanggungjawaban masa lampau para sejarawan berusaha merekonstruksi masa lampau itu sebagai tulisan. Proses untuk menghasilkan sejarah sebagai tulisan ini selanjutnya dilaksanakan dengan suatu metode.

Untuk dapat menghasilkan sejarah sebagai suatu tulisan maka langkah pertama yang dilakukan adalah pengumpulan

bahan keterangan menyangkut penelitian yang berjudul Sejarah Daerah Enrekang. Dalam hal ini pertama-tama ditelusuri sumber-sumber tertulis baik berupa dokumen maupun karya. Dari hasil usaha ini nampak bahwa bahan dokumenter sangat langka sehingga tidak dapat memberikan keterangan yang baik menyangkut objek penelitian. Kenyataan ini mendorong menelusuri keterangan lisan dari orang-orang tertentu yang dipandang dapat memberikan keterangan menyangkut objek penelitian. Rekaman keterangan yang diperoleh itu selanjutnya dilengkapi dengan penelitian lokasi peristiwa meliputi pencatatan dan pendokumentasian objek. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan daya imajinasi kesejarahan, kemungkinan untuk memasuki kelampauan agar dapat dimengerti dan di munculkan kembali (Taufik Abdullah, 1979 : 3). Pada dasarnya suatu rekonstruksi peristiwa sejarah selalu diwarnai oleh kadar imajinasi kesejarahan yang dimiliki dan dihayati. Hal ini tidak dapat dielakkan karena peristiwa sejarah adalah hal yang telah tenggelam pada kelampauan.

Hasil penulisan ini kemudian diseleksi dan dianalisis secara kritis untuk mendapatkan kepastian, dapat tidak keterangan itu menunjang kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya. Hal ini dipandang perlu karena tidak terelakkan setiap keterangan, baik diperoleh dari bahan dokumen maupun lisan mengandung arti subyektif yang dikenakan pada peristiwa itu. Hasil akhir dari proses pertanggungjawaban masa lampau itulah yang kemudian diungkap dalam tulisan yang berjudul Sejarah Daerah Enrekang.

7. Sistematika Laporan Penulisan

Sistematika laporan penulisan yang berjudul Sejarah Daerah Enrekang, meliputi :

- Bab I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika laporan penulisan.
- Bab II : Bagian ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum daerah Kabupaten Enrekang, yang memuat materi antara lain : asal-usul penamaan wilayah, letak dan keadaan alam, penduduk dan kehidupan sosial budaya masyarakat dan yang terakhir adalah agama dan sistem kepercayaan.
- Bab III : Bab ini merupakan bab inti dari penulisan laporan yang memuat materi tentang sejarah perkembangan daerah Kabupaten Enrekang, yang meliputi : masa kerajaan lokal, masa pemerintahan Kolonial Belanda, masa pemerintahan Jepang, dan masa revolusi fisik hingga terbentuknya daerah Kabupaten Enrekang.
- Bab IV : Bagian ini adalah merupakan penutup yang memuat tentang : kesimpulan dan saran yang diajukan berdasarkan temuan lapangan selama penelitian. (*)

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN ENREKANG

1. Asal usul penamaan wilayah

Nama Enrekang mulai dikenal sejak abad XIV dengan sebutan Massenrempulu yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung (H.A.M Mappasanda, 1992 : 2). Sedang sebutan Enrekang dari Endeng yang artinya naik atau panjat dan dari sinilah asal mulanya sebutan Enrekang.

Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam administrasi pemerintahan telah dikenal dengan nama "Enrekang" versi Bugis, sehingga jika dikatakan bahwa daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan sudah mendekati kepastian sebab jelas Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan dan bukit-bukit yang sambung menyambung mengambil kurang lebih 80% dari seluruh luas wilayahnya.

2. Letak dan keadaan alam

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak pada 3 14'36" – 3 50'0" lintang selatan dan 119 40'53" – 120 6'33" bujur timur, dan luasnya 1786,01 km persegi. Sedang ketinggian bervariasi antara 47 sampai 3329 meter di atas permukaan laut (Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2001).

Adapun pusat pemerintahannya berkedudukan di Kota Enrekang yang terletak pada jarak 235 km pada bagian utara Kotamadya Makassar, dan ditempuh dengan mobil selama 5 jam perjalanan. Kabupaten ini dibatasi, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, di sebelah timur dengan Kabupaten Luwu, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, sedang di sebelah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.

Adapun administratif pemerintahannya terbagi menjadi 9 kecamatan antara lain; Kecamatan Maiwa, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Baraka, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Alla, Kecamatan Maiwa Atas, Kecamatan Enrekang Selatan, Kecamatan Alla Timur, dan Kecamatan Anggeraja Timur. Sedang jumlah desa/Kelurahan sebanyak 108.

Sebagai daerah pegunungan dengan udara cenderung dingin Kabupaten Enrekang kaya akan sayuran dan buah-buahan. Jenis sayuran seperti kol, buncis, kentang, wortel, bawang merah, daun bawang, dan kacang merah. Sedangkan jenis buah-buahan yang paling menonjol adalah salak. Buah salak dalam tahun 2000 memperoleh produksi 2.155.280 ton. Sayur-sayuran dan buah-buahan dipasarkan di luar daerah Enrekang, dan juga terdapat perkebunan rakyat seperti kelapa, kopi, lada, kakao, kemiri, cengkeh, dan vanili.

Daerah Enrekang terdapat sungai seperti sungai Maiwa, Bulu, Batulappa, dan lain-lain yang hulunya dari gunung-gunung dan membelah negeri dari segala jurusan dan bermuara pada bagian terbesar di Danau Sidenreng dan Sungai Bungin suatu cabang sungai Saq dang (sungai besar) yang berhulu dari pegunungan tinggi di Tana Toraja. Selain itu, sungai Alla dan Baroko yang dipisahkan satu sama lain

oleh sungai Mata Allo, dan dialiri oleh banyak cabang sungai kecil (Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2001).

Daerah Enrekang juga memiliki hutan, baik hutan lindung maupun produksi. Hutan lindung seluas 72.755 Ha dan hutan produksi 14.597 Ha, dan menghasilkan kayu jati yang berada di Kabupaten Enrekang. Jenis jati rimba sebanyak 977.137 m, dan tanaman rotan dihasilkan di Kecamatan Maiwa sebanyak 380 ton.

Untuk peternakan, populasi sapi sebanyak 30.176 ekor, kerbau sebanyak 5694 ekor. Sedangkan jenis peternakan kecil seperti kambing 20.243 ekor.

Keadaan alam daerah Enrekang yang berbukit batu menambah panorama tersendiri ditandai dengan daerah Bambapuung dengan Buttu Kabobong atau gunung porno yang unik. Daerah ini akan dirintis pula menjadi daerah pariwisata mengingat karena dekat dengan Tana Toraja sebagai daerah tujuan wisata. Adapun objek wisatanya selain Buttu Kabobong juga terdapat permandian alam Lewaja yang jauhnya kurang lebih 5 km dari kota Enrekang, keunikan sistem kepercayaan masyarakat Kaluppini di Desa Ranga, kuburan batu di tontonan Kecamatan Anggeraja yang merupakan sebuah bukit batu yang tingginya puluhan meter telah menjadi penyimpanan mayat sebelum Islam masuk di daerah ini.

3. Penduduk dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Berdasarkan data dari kantor statistik Provinsi Sulawesi Selatan, maka jumlah penduduk Kabupaten Enrekang pada tahun 2001 adalah sebanyak 168.731 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 83.040 jiwa dan perempuan sebanyak 85.691 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak bila dibandingkan dengan laki-laki .

Penduduk yang mendiami Kabupaten Enrekang

tersebar pada 9 kecamatan dengan jumlah yang bervariasi. Jumlah penduduk Kabupaten Enrekang untuk masing-masing kecamatan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 : Jumlah penduduk dirinci menurut jenis kelamin per kecamatan tahun 2001.

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Maiwa	7.692	8.213	15.905
2.	Enrekang	13.887	14.873	28.760
3.	Baraka	14.345	14.316	28.661
4.	Anggeraja	10.488	10.739	21.227
5.	Alla	16.270	16.438	32.708
6.	Maiwa Atas	3.546	3.676	7.222
7.	Enrekang Selatan	3.650	3.858	7.508
8.	Alla Timur	8.200	8.603	16.803
9.	Anggeraja Timur	4.962	4.975	9.937
	Jumlah	83.040	85.691	168.731

Sumber : Kantor Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (Enrekang Dalam Angka 2011)

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa kalau dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, maka jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, hal ini sesuai dengan data penduduk pada 9 kecamatan, masing-masing Kecamatan Maiwa 8.213 jiwa, Kecamatan Enrekang 14.873 jiwa, Kecamatan Baraka 14.316 jiwa, Kecamatan Anggeraja 10.739 jiwa, Kecamatan Alla 16.438 jiwa, Kecamatan Maiwa Atas 3.676 jiwa, Kecamatan Enrekang Selatan 3.858 jiwa, Kecamatan Alla Timur 8.603 jiwa, dan Kecamatan Anggeraja Timur 4.975 jiwa.

Adapun tingkat kepadatan penduduk tiap kecamatan

saling berbeda, sesuai dengan perbedaan luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing kecamatan. Dari 9 wilayah kecamatan di kabupaten Enrekang ternyata Kecamatan Alla merupakan wilayah terpadat penduduknya yaitu mencapai 244 jiwa per km². Untuk lebih jelasnya kepadatan penduduk dalam wilayah Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 : Jumlah penduduk dirinci menurut kepadatan tiap kecamatan di Kabupaten Enrekang tahun 2001

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	Maiwa	272,53	15.905	58
2.	Enrekang	291,19	28.760	94
3.	Baraka	285,80	28.661	100
4.	Anggeraja	108,74	21.227	158
5.	Alla	133,85	32.708	244
6.	Maiwa Atas	357,18	7.222	20
7.	Enrekang Selatan	91,01	7.508	82
8.	Alla Timur	188,75	16.803	89
9.	Anggeraja Timur	56,96	9.937	175

Sumber :Kantor Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (Enrekang Dalam Angka 2001)

Data dalam tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Alla mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, yaitu mencapai 244 jiwa per Km . Sedangkan Kecamatan Maiwa Atas yang paling jarang penduduknya yaitu berkisar 20 jiwa per Km . Data kepadatan penduduk tersebut menunjukkan ketidak seimbangan dalam penyebaran penduduk di Kabupaten Enrekang.

Sedangkan kalau dirinci komposisi penduduk menurut agama yang dianut oleh penduduk di Kabupaten Enrekang, yang meliputi agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katholik dan Hindu. Rincian pemeluk agama di

daerah tersebut dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3 : jumlah penduduk menurut agama yang dianut di Kabupaten Enrekang tahun 2001.

No	Agama	Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Islam	167.678	99,344
2.	Kristen Protestan	883	0,5490
3.	Kristen Katholik	153	0,096
4.	Hindu	73	0,011
	Jumlah	168.731	100,000

Sumber : Kantor Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (Enrekang Dalam Angka 2001)

Mengenai kehidupan sosial budaya masyarakat di daerah Enrekang, maka yang akan ditulis yaitu; pelapisan sosial, sistem kekerabatan, dan sistem teknologi.

3.1. Pelapisan Sosial

Pelapisan sosial dalam masyarakat di daerah Enrekang berdasarkan pada konsep Tomanurung. Konsep ini yang menjadi penyebab terjadinya sistem hubungan antara individu dalam kehidupan sehari-hari. Keturunan Tomanurung yang dianggap statusnya lebih tinggi dari pada masyarakat biasa. Hal ini pula yang menyebabkan timbulnya pelapisan baru di atas masyarakat biasa.

Dalam interaksi antara kedua golongan ini (Tomanurung dan rakyat biasa) dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan timbulnya pelapisan baru yang statusnya lebih rendah daripada kedua pelapisan sosial terdahulu. Disebabkan karena kelahirannya berbeda dengan pelapisan sosial pertama, maka statusnya lebih rendah.

Bentuk pelapisan sosial masyarakat di daerah Enrekang pada masa lalu adalah sebagai berikut :

- Golongan To Puang (Bangsawan)

- Golongan To Maradeka (Rakyat Biasa)
- Golongan To Kaunan (Hamba/Budak milik To Puang) (wawancara dengan Palisuri di Enrekang, 28 April 2003).

Dari pelapisan sosial di atas memberikan gambaran bahwa kaum bangsawan (To Puang) menempati tingkat sosial teratas. To Maradeka sebagai lapisan menengah dan To Kaunan menduduki lapisan masyarakat terbawah. Pada umumnya To Puang dan turunannya dianggap sebagai titipan oleh masyarakatnya, dan merupakan keturunan langsung dari Tomanurung. Tidak ada alternatif lain yang menduduki lapisan ini kecuali asal keturunan atau hubungan darah dengan Tomanurung. Golongan ini adalah pemegang pucuk pimpinan tertinggi di Enrekang yang bergelar Tomakaka. Sedang To Maradeka merupakan golongan masyarakat yang tidak diperhamba karena memang pada dasarnya bukan hamba sahaya dan menempati lapisan tengah. Golongan ini merupakan objek utama dalam pembangunan masyarakat. Pelapisan masyarakat yang terendah adalah To Kaunan (hamba sahaya atau kaum pengabdian). Golongan ini terdiri atas orang-orang tawanan perang dan orang-orang yang tak mampu membayar utangnya atau orang-orang yang telah melanggar adat.

3.2. Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan pada masyarakat di daerah Enrekang, yaitu bilateral di mana mengikuti kedua garis keturunan ayah dan ibu, yang setiap individu dalam kelompok kekerabatan senantiasa diperhitungkan melalui garis keturunan ayah ataupun ibu. Sehubungan dengan itu sistem kekerabatan dalam masyarakat dapat ditelusuri berdasarkan pertalian darah dan perkawinan.

Keluarga inti pada masyarakat Enrekang sama juga dengan daerah lainnya, di mana dalam keluarga inti adalah merupakan kesatuan sosial yang melibatkan orang-orang seperti ayah, ibu, dan anak yang belum menikah. Namun di dalam rumah tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak, namun ada di dalamnya saudara-saudara dan sepupu yang biasa disebut keluarga luas yang terdiri dari anggota keluarga dari kedua belah pihak yaitu ayah dan ibu. Bahkan ada sebagian masyarakat Enrekang tidak hanya keluarga dekat tetapi juga keluarga yang lebih luas lagi atau keluarga jauh seperti famili.

Dalam kehidupan sehari-hari pembagian tugas dalam satu keluarga dikerjakan bersama dan saling membantu, anak laki-laki mengerjakan kebun, perempuan membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan sebagainya. Demikian juga kalau ada kerabat lain, pembagian tugas dalam keluarga tetap dikerjakan bersama-sama. Suami sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah dan mempunyai kedudukan tinggi serta sangat dihormati oleh anggota keluarga lainnya di mana mempunyai tanggung jawab yang besar bagi seluruh keluarganya.

Adapun mengenai istilah-istilah kekerabatan dalam masyarakat di daerah Massenrempulu / Enrekang menurut Drs. Ibrahim Lamada adalah sebagai berikut :

Ambe	: Bapak
Indo	: Ibu
Anang Tubirang	: Anak wanita
Anang Tumuanne	: Anak laki-laki
Salessuran	: Saudara kandung
Sappissen	: Sepupu satu kali
Sappekoren	: Sepupu dua kali

Sappetellu	: Sepupu tiga kali
Nene	: Nenek
Appo	: Cucu
Matua Tumuan	: Mertua laki-laki
Matua Tubirang	: Mertua perempuan
Indo kaporo	: Ibu tiri
Ambe Kaporo	: Bapak tiri
Anang Kaporo	: Anak tiri
Salessuran Kaporo	: Saudara tiri
Manettu	: Menantu
Ipa	: Ipar
Saqlalan	: Lago

(Wawancara dengan Drs. Ibrahim Lamada, di Enrekang, 5 April 2003)

3.3. Sistem Teknologi

Kemampuan teknologi tidak hanya di dominasi masyarakat di perkotaan, namun sudah masuk dipelosok sampai ke desa-desa seperti yang dapat kita lihat di Kabupaten Enrekang masyarakatnya sudah memanfaatkan kemajuan teknologi dalam kehidupannya seperti berikut ini :

- Teknologi Bidang Transportasi
Warga masyarakat di Kabupaten Enrekang sudah banyak yang memanfaatkan kendaraan bermotor baik roda dua (sepeda motor) maupun roda empat (mobil).
- Teknologi Komunikasi
Kecanggihan teknologi masuk ke pelosok pedesaan, maka masyarakat di Kabupaten Enrekang sudah marak memanfaatkan radio, televisi, VCD, dan bahkan telepon mereka juga sudah memanfaatkan. Di samping itu sudah

ada beberapa anggota masyarakat telah memanfaatkan alat komputer sebagai sumber informasi.

- **Teknologi Kesehatan**

Masyarakat di daerah Enrekang masih ada yang mempergunakan jasa dukun untuk mengobati penyakitnya, namun sudah sebagian besar warga masyarakat sudah mendatangi pusat kesehatan atau dokter untuk berobat kalau sakit.

- **Teknologi Pertanian**

Untuk bidang pertanian masyarakat di daerah Enrekang telah banyak yang mempergunakan teknologi modern, dengan memakai traktor untuk membajak sawah dan menggunakan obat-obatan anti hama serta pupuk untuk menyuburkan tanaman untuk meningkatkan hasil pertanian (Nawir, dkk. 2002 : 26).

4. Agama dan Sistem Kepercayaan

Penduduk di daerah Kabupaten Enrekang sebagian besar adalah pemeluk agama Islam. Dari penduduknya yang berjumlah sebanyak 168.731 jiwa yang menempati 9 kecamatan, yang memeluk agama Islam sebanyak 167.678 jiwa atau 99%. Sedang jumlah rumah ibadah di daerah ini meliputi; mesjid sebanyak 364 buah, langgar sebanyak 94 buah dan mushalla 24 buah. Masyarakat di daerah Kabupaten Enrekang cukup taat dalam menjalankan agamanya, sebagai umat Islam mereka dengan tekun sholat lima waktu baik secara berjamaah maupun perorangan. Kegiatan sholat jumat juga rutin dilakukan. Di mesjid ramai didatangi oleh jamaah setiap waktu sholat tiba, tua muda, anak laki-laki, perempuan mengkhhususkan sholat berjamaah di masjid-masjid.

Pengajaran agama sejak usia dini diberikan oleh orang

tua pada anak-anaknya seperti mengajarkan dan mendidik tata cara sholat dan membaca Al-Quran. Sebagai pemeluk agama Islam yang taat masyarakat juga dalam melakukan kegiatan-kegiatan budaya, melakukan dengan nuansa Islam seperti upacara perkawinan, sunatan dan acara budaya lainnya. Kegiatan pengajian rutin dilakukan di kelompok-kelompok pengajian secara bergantian di rumah-rumah dalam kelompok tersebut sebagai tempat pengajian. Perayaan-perayaan hari besar Islam dilakukan setiap tahunnya seperti Maulid Nabi Muhammad SAW.

Meskipun masyarakat Enrekang penganut agama Islam yang taat, mereka sebelumnya bahkan sampai sekarang masih ada sekelompok masyarakat yang percaya kepada animisme dan dinamisme, yaitu percaya kepada kekuatan-kekuatan alam serta penguasa dari makhluk-makhluk serta kekuatan akan roh-roh nenek moyang. Kepercayaan akan hal-hal tersebut mengitari kehidupan manusia, karena bagi mereka dapat dan senantiasa mengganggu keselamatan dan ketenangan manusia, oleh sebab itu ada keengganan untuk keluar rumah pada waktu-waktu tertentu, seperti pada malam hari atau tengah malam terlebih pada malam Jumat, bagi sebagian masyarakat berpendapat bahwa waktu-waktu tertentu tersebut makhluk-makhluk halus bergentayangan. Namun apabila masyarakat dengan terpaksa harus keluar rumah, maka mereka biasanya lebih percaya dan ingat kepada tuhan dan membaca doa.

Kekuatan-kekuatan tersebut di atas mereka namakan Dewata (Dewa). Penamaan Dewata ini disesuaikan dengan nama tempat bersemayamnya (tempat tinggalnya). Pengertian Dewata dari kata Watanna yang artinya memiliki sesuatu

kekuatan. Jadi tidak ada kekuatan lain selain dari kekuatan itu sendiri. Adanya beberapa Dewata yang disesuaikan dengan keberadaan di mana dewata berada seperti, Dewata Jo Palli yaitu dewa yang bersemayam di Gunung Palli, dewa yang menguasai sungai atau sumber air disebut Dewata Jo Wai, dan masih banyak lagi dewa-dewa yang lainnya seperti dewa yang menguasai pepohonan dan dewa yang menguasai daerah-daerah yang dianggap berbahaya, terjal dan curam. Dalam hari-hari tertentu, mereka memberikan sesajen pada dewata-dewata tersebut di tempat-tempat yang dianggap berbahaya agar mereka tidak terganggu dan berharap di berikan keselamatan. Olehnya itu dalam memberikan sesajen sering diberikan yang manis-manis agar para dewa bermanis hati pada mereka. Persembahan semacam ini disebut Mampellao macani-cani, sedang pada tempat-tempat lain seperti pohon-pohon besar, batu-batu besar dan gua-gua diberi seperangkat pangan (sirih), sokko (ketan) dan manuk (daging ayam) serta tuak manis yang disertai dengan pembakaran dupa (kemenyan). Semua kegiatan atau upacara pemberian sesajen yang dilakukan dipimpin oleh seorang dukun yang disebut paso.

Selain dari dewata tersebut di atas, mereka juga percaya kepada pembantu-pembantu dewata yang bertugas mengantar kehendak dewata. Baik berupa hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Selain itu ia pun bertugas memberikan ilham dan mengontrol roh-roh manusia yang telah meninggal untuk diseleksi apakah dia layak masuk surga atau rohnya dikembalikan ke bumi dan menjelma sebagai hantu. Dalam kepercayaan masyarakat Enrekang, hantu atau setan yang ditakuti ada beberapa macam yaitu :

- Indo Cocoi, yaitu hantu yang selalu mengganggu

manusia dan bersemayam di hutan-hutan. Makhluk ini turun di malam hari di kala musim panen tiba, ia datang mengambil beberapa ikat padi hasil panen penduduk yang tersimpan di dalam paqpaq (tempat penyimpanan padi).

- Puang Manuru, adalah makhluk halus yang menyebarkan penyakit cacar, penamaan Puang Manuru (hantu yang baik hati) merupakan suatu penghormatan dengan maksud membujuk makhluk ini agar tidak menyebarkan wabah penyakit cacar.
- Kumandang, adalah makhluk halus yang mendiami sungai yang dalam. Makhluk ini sering memangsa manusia dengan terlebih dahulu menjelma menjadi sebuah tikar kemudian menggulung mangsanya dan membawa ke dalam air dan tidak muncul lagi.

Kepercayaan akan roh-roh nenek moyang mereka hingga kini masih melekat pada masyarakat setempat. Mereka percaya bahwa roh tersebut mempunyai kekuatan dalam memberikan berkah dan keselamatan. Oleh karena itu roh-roh nenek moyang harus dihormati dan dipuja dengan cara memberikan sesajen atau mengadakan upacara-upacara terhadapnya agar tidak mengganggu keturunannya yang ada di bumi.

Bersumber dari kepercayaan-kepercayaan tersebut di atas melahirkan upacara-upacara ritual di mana upacara-upacara tersebut masih dilakukan oleh sekelompok masyarakat Enrekang. Upacara-upacara ritual yang masih dilakukan adalah upacara adat Maccera Manurung (upacara penghormatan arwah leluhur), upacara panen (Mangkandekande), upacara pengobatan (Mampejampi), upacara meminta berkah (Metaqda barakka).

Selain itu ada pula kepercayaan masyarakat setempat mengenai hari-hari baik untuk melakukan sesuatu yang penting. Hari-hari yang dianggap naas oleh mereka adalah hari Selasa. Penundaan hari berlangsung kegiatan seperti sewaktu bepergian dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang jatuh tepat hari Selasa (Wawancara dengan Drs. Arman di Enrekang, 30 April 2003).

BAB III

SEJARAH PERKEMBANGAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

1. Masa Kerajaan-Kerajaan Lokal

Pada bagian ini akan dibahas mengenai federasi Massenrempulu yang meliputi lima kerajaan masing-masing berdiri sendiri, yaitu kerajaan Enrekang, Maiwa, Batulappa, Kassa, dan Duri. Duri juga adalah federasi yang terdiri dari Kerajaan Malua, Alla dan Buntu Batu yang populer disebut Tallu Batu Papan.

1.1. Kerajaan Enrekang

1.1.1. Masa Awal (Masa Tomanurung)

Sebelum Kerajaan Enrekang berdiri, kira-kira antara abad X dan XI Masehi datang Tomanurung Wellangrilangi dan bertempat tinggal di sebelah barat Gunung Bambapuang antara Kampung Kotu dengan Kampung Kusambi. Wellangrilangi mendirikan kerajaan bernama Tinggalungan yang sampai kini bekas tempat rumahnya masih dikeramatkan penduduk sekitarnya dan sering diziarahi.

Pada abad XII Masehi datang Tomanurung Palipada di Bukit Palli Kampung Kaluppini Enrekang dan tinggal bersama istrinya Embongbulan dari Tana Toraja, yang akhirnya Kaluppini menjadi pusat kebudayaan. Tiga orang anaknya menjadi raja di tiga kerajaan di daerah Kerajaan Enrekang.

Daerah atau kelompok yang tidak dipimpin oleh keturunan Tomanurung, maka dipimpin oleh Pake, seperti Pake Cempakan, dan Pake Sarakan (wawancara dengan Palisuri, di Enrekang, 4 Mei 2003).

1.1.2. Berdirinya Kerajaan Enrekang

Kerajaan Enrekang berdiri kira-kira abad XV Masehi, yang didirikan oleh seorang wanita bernama Takkebuku. Ketika anak perempuannya bernama Kota dikawinkan dengan Pasoloi anak laki-laki Puang Timbang dari Ranga, yang dalam pesta perkawinannya ini ke empat raja masing-masing Timbang dari daerah Ranga, Taulan dari daerah Cendana, Cemmba dari daerah Karueng dan Tunggalung dari daerah Papi, menyatakan menjadi satu kerajaan dengan nama Endekan atau Enrekang, karena berkedudukan di Kampung Endekan.

Setelah Takkebuku Raja Enrekang I meninggal, maka beliau digantikan oleh anaknya bernama Kota Raja Enrekang II. Kota mempunyai dua orang anak, seorang perempuan bernama Bissu Tonang Raja Enrekang III, kawin dengan La Patau Addatuang Sawitto Timoreng. Sedangkan anak laki-laki Kota bernama Tomaraju Arung Buttu I kawin di Burake Makale dengan anak Arung Makale. Tomaraju Arung Buttu mempunyai tiga orang anak laki-laki masing-masing Todierung Arung Makale, Tolayuk Arung Baroko, dan Tokalu Arung Buttu. Bissu Arung Enrekang III melahirkan Andi Mappatunru Arung Enrekang III, dan Maemuna kawin dengan Tokalu Arung Buttu yang masih berstatus sepupu satu kali.

Mattunru Arung Enrekang IV kawin di Bone dan melahirkan Baso Panca Arung Enekan V (Palisuri, 1989 :3).

1.1.3. Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan di Kerajaan Enrekang terdiri dari seorang raja yang digelar Tomakaka dibantu oleh pejabat-pejabat kerajaan sebagai berikut :

- a. Tomakaka adalah jabatan yang tertinggi setelah raja dan berwenang untuk memutuskan suatu keputusan dan peraturan yang berlaku dalam wilayah kerajaan.
- b. Ada' (adat) terdiri dari Sullewatang dan pabbicara, adalah pembantu Tomakaka dan berfungsi jika Tomakaka berhalangan. Tugasnya adalah melaporkan mengenai kegiatan yang terjadi dalam masyarakat kepada Tomakaka.
- c. Tomakaka terbagi atas dua yaitu Tomatua I adalah penasehat dalam pemerintahan, sedang Tomatua II hanya merupakan penasehat dalam masyarakat.
- d. Paso terbagi dua yaitu : Paso I adalah mengatur dan melaksanakan pemberian sesajen di tempat upacara adat. Sedang Paso II adalah memberikan sesajen apabila ada orang (keluarga) di kalangan masyarakat yang melakukan keselamatan.
- e. Pande Tanda adalah orang yang meramalkan hari baik untuk melaksanakan kegiatan dalam kampung.
- f. Poutare adalah petugas keamanan yang menjaga keamanan kampung.
- g. Ambe Kombong adalah orang yang berusaha dalam kampung (Kepala Dusun).

(wawancara dengan Palisuri di Enrekang, 4 Mei 2003).

Setelah agama Islam di Kerajaan Enrekang tidak mempengaruhi struktur pemerintahan terdahulu di mana golongan agama (sara') disejajarkan kedudukannya dengan

golongan adat (ada') di dalam kehidupan masyarakat. Para pejabat sara' mengatur urusan upacara-upacara keagamaan, seperti Maulid, Isra' dan Mi'raj, sholat Ied di Istana Raja. Mereka sangat berperan dalam urusan pernikahan raja-raja dan kaum bangsawan lainnya, serta penyelenggaraan upacara-upacara dalam kematian raja dan pembesar kerajaan. Adapun kepemimpinan dalam sara' yaitu :

- a. Kadi adalah pemimpin agama yang menyaksikan sejauh mana kehidupan keagamaan dalam masyarakat.
- b. Imam adalah orang yang memimpin dalam sara'.
- c. Khatib adalah orang yang memberikan wejangan-wejangan tentang ajaran agama pada masyarakat.
- d. Bilal adalah orang yang mengurus tentang keuangan mesjid dan perawatannya.

Untuk menggabungkan golongan adat dan sara' maka diangkat golongan baru yang disebut Ambe' yang terdiri dari 7 orang dan berfungsi sebagai penengah antara golongan ada' (adat) dengan golongan sara' (agama) (wawancara dengan Drs. Ibrahim Lamada di Enrekang, 3 Mei 2003).

1.2. Kerajaan Maiwa

1.2.1. Masa Awal (Masa Tomanurung)

Tomanurung yang pertama di Tanah Maiwa bernama Lapaeso. Lapaeso ditemukan oleh penduduk di dalam tabung bambu dalam keadaan seorang bayi, karena itu oleh masyarakat setempat Lapeso dikenal sebagai Tomanurung dan mempunyai tiga orang anak. Lapaeso tidak membawa misi ajaran akhlak. Bermula munculnya Lapaeso muncul pula sejenis buah-buahan yang sekarang dikenal durian. Lapaeso ditemukan di Rowa Desa Matajang yang dikenal penduduk

sebagai daerah Timoran Sa'dan. Keadaan penduduk ketika itu masih serba primitif, tinggalnya di gua-gua. Dalam sebuah legenda yang berjudul Gua Pu Sallo, di mana gua ini sering ada orang hilang di dalam bila tidak menyiapkan tali ratusan meter sebelum masuk. Di gua lain seperti Labale di daerah Maiwa adalah tempat tinggal penduduk pada masa purba.

Sebelum Lapaeso menghilang di tanah Maiwa ia berpesan kepada anaknya agar kelak keturunannya bisa menjadi pemimpin. Setelah menghilangnya Tomanurung Lapaeso di Tanah Maiwa, muncul pula Tomanurung kedua yang dikenal dengan nama Laceppaga seorang perempuan cantik, yang ditemukan penduduk di daerah Taulan di atas pohon pisang raja. Laceppaga ini mempunyai tiga orang anak masing-masing :

- a. La Makkapiapi menjadi Arung Limbung
- b. La Makkawaru menjadi Arung Lullung
- c. La Takkebuku menjadi Arung Limbung dan Lullung di Tanah Maiwa dan beliaulah peletak dasar Kerajaan Maiwa (Drs. Sila Sarrang, 1989 :8).

1.2.2. Berdirinya Kerajaan Maiwa

Kerajaan Maiwa pada mulanya bernama Tapong berdiri kira-kira abad XV Masehi, yang didirikan oleh Latakkebuku anak dari Tomanurung Laceppaga. Latakkebuku adalah seorang wanita cantik yang menguasai kesaktian luar biasa (wawancara dengan Palisuri di Enrekang, 4 Mei 2003).

Adapun wilayah kekuasaannya meliputi: Tapong, Limbuan, Pasang dan Hillung: pada masa pemerintahan Raja Latakkebuku, kerajaan ini mencapai masa kejayaannya sehingga beberapa kerajaan tetangganya cemburu dan ingin

mengusai seperti: Kerajaan Sidenreng Rappang dan Bone. Serangan dari kedua kerajaan ini dapat dipatahkan oleh Latakkebuku dan pasukannya, maka kerajaan Sidenreng Rappang dan Bone memberi julukan kepada pasukan Latakkebuku dengan nama Tomawa yang artinya orang yang melawan. Tomewa berubah menjadi Tomaiwang dan kemudian menjadi Tomaiwa atau Maiwa (Drs. Andi Haruna Makkulase, 1986: 37).

Kemudian setelah Raja Takkebuku mangkat, maka ia digantikan oleh putrinya yang bernama We Battilan, atas usul suaminya yang juga seorang punggawa perang dari Bone. Kerajaan Maiwa yang pada masa pemerintahan Latakkebuku bernama Tapong, resmi berubah nama atas musyawarah keluarga kerajaan dan ketua-ketua adat menjadi Kerajaan Maiwa.

Kerajaan Maiwa dikembangkan dengan jalan mengirim putra We Battilan ke Rowa dengan gelar Puakta Rowa. Beliau menguasai darah timur yang selama ini di bawah kekuasaan anak cucu Tomanurung Lapaeso.

1.2.3. Struktur Pemerintahan

Adapun struktur pemerintahan di Kerajaan Maiwa terdiri dari seorang raja yang diberi gelar Arung, didampingi oleh anggota-anggota adat, yang meliputi: seorang Sullewatang dan seorang Pabbicara. Raja yang memerintah kerajaan adalah seorang Matasaq asli atau keturunan raja. Dia dipilih oleh dewan kerajaan dengan persetujuan Raja Sidenreng. Di dalam struktur pemerintahan ada istilah Arung Malolo yang bertugas menggantikan posisi raja apabila raja atau arung sakit.

Sedangkan jabatan di bawah raja seperti kepala-kepala lili yaitu: Arung Bunging dan Arung Baringen, dengan biasanya

adat dan kepala-kepala kampung, Arung Malolo dan anggota-anggota adat diangkat dan diberhentikan oleh raja dengan persetujuan dari dewan kerajaan (H.A.M Mappasanda, 1991: 11).

1.3. Kerajaan Batulappa

1.3.1. Berdirinya Kerajaan Batulappa

Kerajaan Batulappa berdiri kira-kira akhir abad XVI Masehi, yang didirikan oleh seorang wanita bernama I Coma anak tertua Arung Buttu dari Enrekang. Selanjutnya pada abad XIX berturut-turut memerintah Kerajaan Batulappa yaitu Arung Lampa dan Matoa Kalau (wawancara dengan Palisuri di Enrekang, 4 Mei 2003).

1.3.2. Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan di Kerajaan Batulappa terdiri dari seorang Sullewatang dan dua Pabbicara. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh raja atas kesepakatan dari dewan kerajaan.

Setelah Islam masuk di Kerajaan Batulappa pada awal abad XVII, Sara' dibagi lima bagian yakni: Khadi, Imam, Khatib, Bilal dan Guru.

Di ibukota kerajaan kedudukan Khadi adalah kepala dari sara' dan di dalam berbagai kampung yang penting ditempatkan seorang Imam, beberapa Khatib dan Bilal. Penyelenggaraan yang berhubungan dengan keagamaan adalah wewenang Khadi, dan menjaga agar semua ketentuan dalam Islam diikuti dengan baik, mesjid-mesjid juga dipelihara dengan baik (H. A. Mappasanda, 1991: 20).

1.4. Kerajaan Kassa

1.4.1. Berdirinya Kerajaan Kassa

Kerajaan Kassa berdiri kira-kira akhir abad XVIII Masehi,

yang didirikan oleh seorang raja yang bernama Sammang. Raja yang memerintah di kerajaan ini digelar Arung dan ditangannya terletak kekuasaan tertinggi (wawancara dengan Palisuri di Enrekang, 4 Mei 2003).

1.4.2. Struktur Pemerintahan

Struktur Pemerintahan di Kerajaan Kassa terdiri dari seorang raja didampingi oleh Sullewatang dan Pabbicara. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh raja atas kesepakatan dari dewan kerajaan. Pada tingkat bawah setelah Sullewatang dan Pabbicara, terdiri dari Gallarang, Matowa dan Jannang yang dipilih oleh penduduk kampung, diangkat dan diberhentikan oleh adat.

Di Kerajaan Kassa setelah diterimanya Islam sebagai agama resmi dalam kerajaan maka sara' disejajarkan kedudukannya dengan adat di dalam kehidupan masyarakat. Para pejabat sara' mengatur hak-hak yang menyangkut dengan keagamaan (wawancara dengan Drs. Ibrahim Lamada di Enrekang, 3 Mei 2003).

1.5. Kerajaan Duri

1.5.1. Masa Awal (Masa Tomanurung)

Sejarah tertua yang diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi bahwa manusia pertama di Sulawesi Selatan adalah Tamboro Langiq, turun dari langit melalui sebatang bambu yang sangat besar di atas puncak gunung tertinggi Latimojong, gunung Rante Kambola yang tingginya 3453 meter terletak dalam Kerajaan Buntu Batu, federasi Duri.

Tamboro Langiq kawin dengan Sanda Biliq wanita jin air dari Sungai Saq dang. Dari perkawinan ini lahir anak-anaknya; Puang Malakongan, Puang Papaq Langiq, Puang Tomabuli,

dan Puang Banda Boro. Mereka dilahirkan diberbagai tempat seperti; di Napo, Gasing, Batu Uling, dan Batu Borrong. Selain anak-anak tersebut dilahirkan pula empat orang anak wanita yang namanya tidak diketahui. Ketika anak-anak wanitanya sudah akil baliq, Sanda Biliq bersama mereka kembali masuk ke dalam air Sungai Saq dang, menghilang di bawah permukaan air dan tidak lagi muncul kembali. Maksud dari Sanda Biliq melakukan hal ini adalah untuk menjaga, jangan sampai kakak beradik satu dengan yang lainnya kawin.

Dari anak Tamboro Langiq dan Sanda Biliq, hanya Puang Sanda Boro, yang diketahui kawin dengan seorang wanita jin bernama Tobuqtu Ribatang. Dari perkawinan ini lahir seorang anak laki-laki bernama Lakipada, orang yang istrinya menghilang. Ketika Lakipada sudah tua ia membagi kerajaan di Sulawesi kepada ketiga anaknya, dan menetapkan Bambapuang wilayah Kerajaan Duri sebagai pusat kerajaan.

Bertolak dari Bambapuang ditarik suatu garis selatan ke utara dan suatu garis timur ke barat sebagai batas dari ketiga kerajaan.

Bagian utara ke timur laut ditetapkan Luwu, dan Patta Labunga ditunjuk sebagai Kepala Kerajaan. Bagian utara barat daya ditetapkan Kerajaan Torongkong (Toraja) dan ditunjuk Patta Labantang sebagai rajanya. Kemudian seluruh wilayah di sebelah selatan dari garis timur barat ditetapkan menjadi Kerajaan Gowa, dan Patta Lamerang, ditunjuk sebagai rajanya (H. A. M. Mappasanda, 1989: 3).

1.5.2. Berdirinya Kerajaan Duri

Cikal bakal raja yang memerintah di Kerajaan Duri adalah keturunan Puang Tamboro Langiq. Namun berdirinya Kerajaan Duri tidak diketahui dengan pasti, hanya yang dapat

diketahui raja pertama dari asal mula Kerajaan Duri dinamai Tomalange, yang dilahirkan di Kampung Tondon daerah Malua. Nama dari bapaknya tidak diketahui, tetapi di dalam sejarah Sangalla disebut Pagonggang.

Kerajaan Duri atau federasi Duri, juga disebut Tallu Batu Papan, yang terdiri dari kerajaan-kerajaan yang bebas satu dengan lainnya, meliputi Kerajaan Malua, Alla dan Buntu Batu. Ketiga kerajaan ini berpangkal dari Kerajaan Duri dan Baroko serta kepadanya ditambahkan wilayahnya karena perkawinan, dan masing-masing kerajaan diperintah oleh seorang arung.

Adapun raja yang memerintah di Kerajaan Malua bernama Lagali, di Kerajaan Alla bernama I Lorong dan di Kerajaan Buntu Batu bernama Labuttu, yang kesemuanya keturunan Tomalange. Untuk mengadakan permufakatan menyangkut tiga kerajaan, raja-raja datang berkumpul bersama-sama di tempat permusyawaratan yang menyangkut urusan ke dalam dari Kerajaan Malua. Untuk kerajaan Alla tempat permusyawaratannya di atas bukit Mata Allo, sebelah timur Sungai Mata Allo daerah Kalosi. Sedangkan pertemuan ke dalam dari Kerajaan Buntu Batu berlokasi di Buntu Batu.

Baroko dahulu kala tidak terhitung masuk dalam Kerajaan Duri, tetapi hanya dianggap sebagai Lili dari Alla, mempunyai tempat permusyawaratan di Kampung Toqtallang dekat istana arung. Kemudian di antara ketiga kerajaan dalam federasi, Kerajaan Malualah yang dianggap penting karena Malua Kerajaan Duri dan juga dialah tertua.

1.5.3. Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan di Kerajaan Duri atau federasi Duri yang meliputi Kerajaan Malua, Alla, dan Buntu Batu berlaku

sama, artinya pemerintahan kerajaan dilaksanakan oleh seorang raja yang bergelar Arung dibantu oleh suatu dewan adat yang terdiri dari seorang Sullewatang dan Pabbicara. Kemudian setelah Islam masuk di Kerajaan Duri pada abad ke-17, maka sara' (agama) disejajarkan kedudukannya dengan adat di dalam kehidupan masyarakat. Para pejabat sara' mengatur hal-hal yang menyangkut dengan keagamaan (wawancara dengan Drs. Ibrahim Lamada di Enrekang, 3 Mei 2003).

2. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda

Seluruh wilayah Enrekang dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1906. Dengan penguasaan wilayah ini, maka pemerintah Belanda menguasai segala aspek kehidupan baik politik, sosial maupun ekonomi. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Enrekang adalah jelmaan dari alinasi beberapa kerajaan-kerajaan yang disebut Kerajaan Massenrempulu.

Kerajaan Massenrempulu terletak di jantung Sulawesi Selatan yang berada di pegunungan dan di tengah-tengah kerajaan-kerajaan besar, di mana pada awalnya kurang menaruh perhatian terhadap kerajaan ini (Sagimun M. D, 1964: 446). Hal tersebut berubah setelah ternyata daerah ini merupakan daerah penghasil kopi yang bermutu, terutama daerah/desa Bungin (Enrekang). Hasil bumi inilah yang ingin dimonopoli oleh Belanda dengan jalan membeli langsung dari pedagang-pedagang di Enrekang atau membeli langsung dari petani kopi di daerah Bungin. Pemerintah Hindia Belanda membeli kopi tersebut dengan harga sangat murah, yang akibatnya merugikan para petani dan pedagang lokal.

Di samping memiliki alam yang sangat subur, daerah Enrekang juga sering dimanfaatkan oleh kerajaan-kerajaan

lain yang menentang Pemerintahan Hindia Belanda sebagai tempat pertahanan terakhir dan menjadi tempat pertahanan terakhir dan menjadi tempat mengundurkan diri, apabila didesak oleh serangan Belanda (Saliba Kasim, 1971: 26).

Usaha pemerintah Hindia Belanda untuk memperluas wilayah kekuasaan di Sulawesi Selatan didorong oleh pemerintah dari kerajaan-kerajaan guna melaksanakan kebijaksanaan sistem pelabuhan wajib pajak yang telah direncanakan Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini menimbulkan penolakan penolakan dari rakyat Sulawesi Selatan. Penolakan kebijakan tersebut menyebabkan Van Heutz mencanangkan politik perluasan koloni yang dikonsekan dalam istilah politik perdamaian. Menurut Muh. Abduh dkk, bahwa tujuan dari pelaksanaan fasifikasi atau politik perdamaian di Sulawesi Selatan adalah :

1. Menciptakan keamanan untuk menjamin keberhasilan usaha penanaman modal swasta dan modal asing lainnya di Sulawesi Selatan.
2. Menguasai tanah yang potensial untuk pertanian, perkebunan, dan pertambangan dalam rangka memperluas usaha penanaman modal swasta di Indonesia.
3. Mencegah masuknya pengaruh bangsa asing lainnya di kerajaan-kerajaan luar Pulau Jawa (Muh. Abduh dkk, 1981: 96).

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905 mulai mengadakan tindakan militer terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Massempulu (Enrekang).

Pemimpin kerajaan-kerajaan Massenrumpulu selalu

membantu kerajaan tetangga yaitu kerajaan yang ada di wilayah Ajattappareng untuk melawan pemerintah Hindia Belanda. Bahkan pemimpin perjuangan di Kerajaan Sawitto, beberapa kali lolos dari penangkapan pemerintah Hindia Belanda karena berlingung dan bersembunyi di daerah Massenrumpulu. Hal ini pulalah yang menyebabkan pemerintah Kolonial Belanda mengadakan peperangan terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Massenrumpulu.

Sebelum kedatangan Pemerintah Hindia Belanda, Kerajaan Enrekang telah mempersiapkan benteng-benteng pertahanan sebagai persiapan untuk menghadapi serangan Belanda. Untuk hal tersebut, di Kerajaan Enrekang oleh pemimpinnya "Pancaitana Bunga WaliE" mengerahkan rakyatnya untuk membangun benteng-benteng pertahanan antara lain Benteng Londe-Londe dan Benteng Kalluppini (Drs. Andi Haruna Makkulasse, 1986: 51-52).

Dengan pemimpin dan rakyat Enrekang tentang usaha penguasaan dan penyerangan Belanda di daerahnya akhirnya terbukti dengan adanya serangan pada akhir tahun 1905. Serangan terhadap Enrekang semakin gencar sejak adanya pergantian pemimpin di pihak Belanda pada tanggal 27 Januari 1906 dari Letkol Van Bennekern kepada Mayor de Wijs (Muh. Abduh, dkk 1981: 131). Sasaran utamanya adalah merebut Kota Enrekang. Kota ini berhasil diduduki oleh Pemerintah Hindia Belanda setelah melalui pertempuran yang sengit sehari-hari lamanya untuk merebut Benteng Londe-Londe, Ranga dan Kalluppini.

Pada tanggal 1 Maret 1906, Mayor de Wijs sendiri tiba di Enrekang, Dia berhasil membujuk Arung Enrekang, Ratu Pancaitana dengan perantaraan suaminya La Patiroid

Arung Soreang untuk menandatangani perjanjian pendek pada tanggal 4 Maret 1906, sejak itulah Enrekang menjadi pusat kedudukan pemerintah Hindia Belanda di daerah Massenrumpulu, dari sini serangan Belanda dilancarkan untuk merebut benteng-benteng lainnya yang belum tunduk seperti Kotu, Bamba Puang, Alla dan Buntu Batu.

Meskipun Arung Enrekang sudah menandatangani perjanjian dengan pemerintah Hindia Belanda namun perlawanan rakyat Enrekang dan Massenrempulu umumnya belum berhenti. Pimpinan perlawanan dipegang oleh La Rangnga, salah seorang Ma'dika dalam Kerajaan Enrekang. Ia berhasil mengadakan kerjasama dengan Kerajaan Duri dan Maiwa (Saliba Karim, 1977: 41).

Beberapa tokoh yang muncul untuk memimpin rakyat dalam melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda di antaranya : Daenna Marajang dan Arung Pati yang memimpin perjuangan di Kerajaan Kalua, Imam La Rajja yang berjuang di Benteng Bambapuang dan Benteng Kotu, La Gali, dkk berjuang di Kerajaan Alla serta Puanna Seppu di Benteng Buntu Batu.

Setelah melewati peperangan sengit dan memakan waktu yang sangat lama, akhirnya satu-persatu benteng-benteng yang ada dalam wilayah Kerajaan Massenrempulu jatuh ke tangan pemerintah Hindia Belanda, kekalahan pasukan Massenrempulu diakibatkan oleh sarana persenjataan yang belum memadai.

Setelah kemenangan Belanda, selanjutnya diikuti oleh penangkapan terhadap orang-orang atau rakyat yang dianggap sebagai pemberontak, terutama para pemimpin perjuangan. Menjelang akhir dari perjuangan, maka ditandatangani sebuah perjanjian oleh masing-masing kepala kerajaan. Adapun isi

perjanjian tersebut adalah :

1. Kerajaan (Malua, Buntu Batu, dan Alla) harus menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah Hindia Belanda.
2. Patuh dan taat pada peraturan Pemerintah Hindia Belanda.
3. Bersedia meniadakan kekuatan militernya.

Perjanjian pendek tersebut ditandatangani oleh ketiga pemimpin kerajaan, I Lorong, La Gali dan La Buttu di Pare-Pare pada tanggal 11 Januari 1909 dengan Beslit dari tanggal 9 Juni 1909 (H. A. M. Mappasanda, 1991: 63).

Perlawanan di daerah Masserempulu reda yang kemudian ditempatkan di bawah kekuasaan langsung oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan status Onderafdeling Enrekang yang merupakan bahagian dari Afdeling Pare-Pare.

Onderafdeling Enrekang dibagi menjadi 5 (lima) wilayah pemerintahan yang disebut Zelt berturude landschappen, yaitu Enrekang, Alla, Maiwa, Buntu Batu, Malua. Adapun Alla', Malua dan Buntu Batu dahulunya adalah Kerajaan Duri dipecah tiga oleh Belanda. Kerajaan Kassa dan Batu Lappa oleh Belanda digabungkan ke dalam Kerajaan Sawitto (Onderafdeling Pinrang).

3. Masa Pemerintahan Jepang

3.1. Kedatangan Jepang Di Daerah Enrekang

Pada tanggal 10 Januari 1942, Jepang menghancurkan kekuasaan Hindia Belanda (Indonesia). Satu demi satu wilayah kekuasaan Hindia Belanda dan akhirnya Jepang berhasil menduduki Indonesia secara keseluruhan dengan ditandatangani Kapitulasi Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942,

antara Pemerintah Hindia Belanda yang diwakili oleh Letnan Jenderal H. Ter Poorten dan Pemerintah kekaisaran Jepang yang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura (Marwati Djoened, dkk, 1990: 5). Maka secara resmi Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Pemerintah Jepang. Akibat kekalahan Pemerintah Hindia Belanda itu, maka secara resmi pula pemerintah kekaisaran Jepang menguasai Hindia Belanda.

Pada masa pemerintahan Jepang, Indonesia memasuki suatu periode pendudukan militer Jepang wilayah Hindia Belanda dibagi dalam tiga wilayah pemerintahan yaitu:

- Jawa dan Madura berada dalam pengawasan kekuasaan pemerintah bala tentara Jepang ke-16 yang berkedudukan di Jakarta.
- Sumatera berada dalam pengawasan pemerintahan bala tentara Jepang ke-25 yang berkedudukan di Bukit Tinggi.
- Kepulauan-kepulauan lain di Indonesia, berada dalam pemerintahan angkatan laut (Kaigun) Jepang yang berkedudukan di Makassar (Irawan Soejito, 1982: 108).

Penerapan pemerintah wilayah Indonesia sesuai dengan pasukan yang didaratkan seperti yang disebutkan di atas. Di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Irian Barat berada dalam pengawasan angkatan laut Jepang, dengan markas di Makassar.

Di daerah Sulawesi, ekspansi militer Jepang di bawah pimpinan Admiral Kurita dari Kesatuan Kaigun (angkatan laut), yaitu bermula dengan merebut Kota Manado pada tanggal 11 Januari 1942, serta 13 hari kemudian yaitu pada tanggal 24 Januari 1942 Jepang sudah menduduki Kota

Kendari, dan akhirnya ke Makassar dan sekitarnya pada tanggal 9 Februari 1942 (Drs. Harun Kadir, dkk, 1978: 90).

Dari Makassar tentara Jepang mengadakan serangan kilat ke pedalaman Camba dan Enrekang yang merupakan pertahanan terakhir Belanda di Sulawesi Selatan. Dengan kalahnya Belanda di daerah pedalaman ini, menjadi titik pergantian dari Belanda kepada Jepang di Sulawesi Selatan.

Khususnya di daerah Enrekang, tentara Jepang pertama mendarat pada bulan Februari 1942. Namun setelah Jepang dapat merebut benteng pertahanan Belanda yang berada di Kampung Kotu, Mendatte dan Bambapuang, maka tentara Jepang kembali lagi ke Makassar (Ida Dian, 1991: 30). Kemudian pada akhir 1943, datanglah tentara Jepang di daerah ini di bawah pimpinan Tapio Kokuda (wawancara dengan Drs. H. Kussian Narra di Cakke 30 April 2003). Kedatangan tentara Jepang tersebut seperti halnya di daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan, umumnya disambut baik oleh masyarakat tidak terkecuali masyarakat di daerah Enrekang. Sambutan yang baik itu dilatarbelakangi oleh anggapan masyarakat bahwa tentara Jepang sebagai penyelamat bagi mereka dari penjajahan Belanda, yang telah menjajah berpuluh-puluh tahun.

Pada tahun-tahun pertama pendudukan Jepang di daerah Enrekang Tentara Jepang terus-menerus melancarkan propaganda tentang maksud-maksud baik pemerintah Jepang untuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, dengan suatu slogan: Nippon-Indonesia sama-sama. Nippon adalah saudara tua, sedangkan Indonesia adalah saudara muda, yang tua wajib membimbing yang masih muda. Karena itu, rakyat Indonesia harus merasa satu keluarga dengan Jepang (wawancara dengan R. Patria di Carruk, 1 Mei 2003).

3.2. Bidang Struktur Kekuasaan dan Pemerintahan

Pada masa pemerintahan Jepang, daerah Sulawesi Selatan dapat dibagi atas enam Kenkanrikan:

- a. Makassar Kenkanrikan berpusat di Makassar, Makassar Kenkanrikan terdiri dari Makassar, Maros, Gowa, Pangkajene Kepulauan, Takalar, dan Jenepono.
- b. Bantaeng Kenkanrikan berpusat di Bantaeng terdiri dari Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan Selayar.
- c. Bone Kenkanrikan berpusat di Bone terdiri dari Bone, Wajo, dan Soppeng.
- d. Pare-Pare Kenkanrikan berpusat di Pare-Pare terdiri dari Pare-Pare, Barru, Sidrap, Pinrang, dan Enrekang.
- e. Mandar Kenkanrikan berpusat di Majene, terdiri dari Majene, Polewali dan Mamuju.
- f. Luwu Kenkanrikan berpusat di Palopo terdiri dari Masamba, Malili, Palopo, Makale Rantepao (Drs. Harun Kadir, dkk, 1984: 76).

Berdasarkan pembagian wilayah tugasnya di atas, maka untuk daerah Enrekang masuk ke dalam Kenkanrikan Pare-Pare. Jadi pada masa pendudukan Jepang di daerah Enrekang di bidang pemerintahan yang sebelumnya dipegang oleh Belanda tidak mengalami perubahan dan tetap dipakai, kecuali namanya yang telah dirubah yakni dari Landschap (Belanda) menjadi Soetjoo (Jepang) di bawah Bunken Enrekang.

Masyarakat di daerah Enrekang pada masa pemerintahan Jepang, tetap diberi wewenang untuk memerintah dan dalam urusan keagamaan tentara Jepang tidak mencampurinya, kecuali dalam urusan ekonomi. Hal ini dilakukan oleh tentara Jepang agar supaya dapat mempertahankan hidupnya, sampai yang mereka cita-citakan dapat tercapai (wawancara dengan

R. Patria di Carruk, 1 Mei 2003).

Pada masa pemerintahan Jepang di daerah Enrekang semua kegiatan-kegiatan pemerintahan Belanda tidak mengalami perubahan. Tidak ada pergantian pejabat sehingga pejabat-pejabat lokal yang dipakai pada masa pemerintahan Belanda tetap menjalankan tugasnya pada masa pemerintahan Jepang. Walaupun terjadi pengangkatan pejabat-pejabat lokal, maka tentara Jepang tidak terlalu berperan, karena yang berperanan di sini ialah hanya Tomatua-Tomatua kampung (penasehat dalam pemerintahan) yang terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan masyarakat. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Arung/Puang, dan wakilnya disebut Sullewatang, sementara yang mengurus pelaksanaan pemerintahan dan urusan peradilan disebut pabbicara. Sekalipun kekuasaan tertinggi di tangan Arung atau Puang namun dalam hal ini Tomatua-Tomatua kampung sangat besar peranannya.

Pada masa pemerintahan Belanda (Landschap) maupun pada masa pemerintahan Jepang (Seotjoo) di daerah Enrekang, Arung, Sullewatang, Pabbicara, Polisi dan Juru Tulis, semuanya mendapat surat keputusan dari pemerintah Belanda dan Jepang. Sedangkan pejabat-pejabat lain misalnya: Kadhi dan stafnya, Banka dan Kepala Kampung tidak mendapat surat keputusan dan gaji, penghasilannya bersumber dari rakyat (Mukhlis Paeni, dkk, 1985: 192).

3.3. Bidang Kemiliteran

Pada tahun 1944, tentara Jepang mendirikan sekolah militer di Anggeraja daerah Enrekang, yaitu di Kampung Carruk dengan orbitasinya kurang lebih 18 Km dari ibukota kabupaten. Tujuan sekolah militer ini adalah untuk menggembleng pemuda-pemuda Enrekang dalam rangka

untuk menghadapi tekanan-tekanan musuh Jepang yaitu pasukan sekutu.

Murid-murid sekolah ini terdiri dari pemuda-pemuda yang berusia 15 tahun ke atas, juga diikutkan dalam barisan Seinendan (latihan pertahanan rakyat), sedangkan yang berumur 14 tahun ke bawah ikut dalam barisan Seinenku Rencho. Barisan pertahanan rakyat lainnya yang dibentuk oleh pasukan tentara Jepang adalah Keibodan, yaitu barisan bantu kepolisian, Suisintai yaitu barisan pelopor yang bertugas pelopor yang bertugas mempelopori pertahanan wilayah dari serangan sekutu. Heiho yaitu barisan bantu angkatan darat. Murid-murid yang dihimpun dalam pendidikan ini pada dasarnya akan dijadikan tentara pembantu Jepang sebagai pasukan berai mati (Jabakutai). Setelah Jepang meninggalkan daerah ini, maka barisan-barisan inilah yang banyak melahirkan tentara-tentara di daerah Enrekang, seperti Uwak Gading, Uwak Tapa, Ambe Teppo, Puang Senga dan sebagainya.

Para pemuda di dalam menjalankan pendidikannya selain mendapat latihan kemiliteran, juga dipompakan semangatnya sebagai anti Inggris dan Amerika lewat nyanyian-nyanyian:

“Awat Inggris dan Amerika, musuh bagi Asia

Inggris harus diberi linggis, Amerika harus disetrika”

Sekalipun latihan penggemblengan pemuda-pemuda di Enrekang dipersiapkan untuk kepentingan pertahanan Jepang di dalam menghadapi sekutu, namun tidak bisa dipungkiri bahwa latihan-latihan tersebut menjadi modal pengalaman yang sangat penting bagi pemuda-pemuda di daerah Enrekang untuk memperkuat kesatuan-kesatuan kelaskaran di dalam menghalau musuh penjajah yang datang ke daerah ini.

Sekolah-sekolah militer yang didirikan oleh tentara Jepang di Anggeraja daerah Enrekang, secara sistematis dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pendidikan Seinendan (latihan pertahanan rakyat). Pendidikan ini khusus untuk yang berumur 15 tahun ke atas.
- b. Pendidikan Seinenku-Rensho (latihan pertahanan rakyat). Pendidikan ini khusus untuk anak yang berumur 14 tahun ke bawah.
- c. Pendidikan Keibodan (barisan bantu kepolisian)
- d. Pendidikan Suisintai (barisan pelopor yang memelopori pertahanan wilayah dari serangan sekutu).
- e. Heiho (barisan bantu angkatan darat).

Pendidikan yang dilaksanakan di Carruk Enrekang ini diikuti oleh utusan-utusan dari : Luwu, Tana Toraja, Enrekang, Sidrap dan Pare-Pare (wawancara dengan Drs. H. Kussian Narra di Cakke, 2 Mei 2003). Setelah mereka tamat dari pendidikan ini., mereka harus kembali ke daerahnya masing-masing untuk mengikuti kegiatan tentara Jepang yang ada di daerah tersebut.

3.4. Bidang Ekonomi

Tentara Jepang pada awal pendudukannya di daerah Enrekang sangat menarik simpati masyarakat. Tentara Jepang melihat keadaan penduduk yang sangat miskin kemudian membagi-bagikan makanan kepada masyarakat yang berdekatan dengan lokasi tempat tinggalnya, di mana sebelumnya makanan-makanan tersebut tidak pernah dinikmati oleh masyarakat setempat pada masa pemerintahan Belanda. Makanan-makanan itu antara lain : gula pasir, susu, sabun dan lain sebagainya. Dengan adanya hal tersebut

di atas, maka kepercayaan masyarakat Enrekang kepada Tentara Jepang semakin kuat, karena tentara Jepang pun tidak melarang atau menekan setiap kehidupan rakyat. Apapun yang dikehendaki oleh masyarakat, yang sebelumnya dilarang oleh pemerinah Belanda masyarakat boleh mengerjakannya (wawancara dengan Palisuri di Enrekang, 30 April 2003).

Namun pada awal tahun 1944, kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh tentara Jepang kepada masyarakat Enrekang, sedikit demi sedikit mulai berkurang dan mulailah tentara Jepang memperlihatkan sikap kekuasaannya kepada masyarakat. Kehidupan ekonomi masyarakat Enrekang di tiap-tiap kampung berada dalam tingkat yang sangat buruk. Tekanan-tekanan terhadap rakyat makin lama makin berat. Kalau di daerah lain rakyat dipaksa untuk mengerjakan sawahnya dalam memenuhi kebutuhan tentara Jepang, maka di daerah Enrekang tidaklah demikian halnya, sekalipun masyarakat mempunyai beberapa petak sawah namun untuk mengerjakan tidak ada waktu oleh karena laki-laki dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan tentara Jepang dalam menghadapi serangan dari tentara sekutu.

Sekalipun masih ada penduduk yang sempat untuk bertani, namun hasil pertaniannya tidak pernah sampai untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, disebabkan tentara Jepang tidak pernah merasa peduli terhadap kebun-kebun rakyat. Kuda-kuda tentara Jepang ditambahkan sesuka hatinya, bahkan mereka mencari kebun penduduk yang ada tanamannya untuk makanan kuda-kudanya. Lagipula kebun-kebun di daerah Enrekang harus diberi pagar, karena percuma penduduk bertani, apabila kebunnya tidak diberi pagar (pagar batu karena pada saat itu belum ada pagar kawat). Apabila

tentara Jepang mengadakan suatu perjalanan dan arah perjalanannya terhalang oleh pagar kebun, maka mereka akan membongkar pagar tersebut dan menjadikannya sebagai jalan.

Pada saat itulah kehidupan penduduk di daerah Enrekang berada dalam kondisi yang sangat buruk. Untuk kebutuhan pokok sehari-hari yang biasa dijual di pasaran bebas seperti : garam, ikan, beras, dan sebagainya dihadang oleh tentara Jepang di daerah Enrekang selama kurang lebih satu tahun, kebutuhan pokok tersebut di atas tidak pernah sampai. Terutama garam, sudah beruntung bila anggota masyarakat dapat mencicipi garam sekali dalam seminggu.

Akibatnya para petani dan keluarganya hanya dapat makanan seperti jagung itupun tidak semuanya. Masyarakat Enrekang juga mempunyai : ubi, pisang muda yang diiris-iris kemudian dicampur dengan ubi serta sambe (sagu) dan sikapa (sejenis umbi-umbian yang dapat diperoleh di tengah hutan). Cara menjadikannya sebagai bahan makanan ialah umbi dipotong-potong kecil, setelah itu direndam dalam air beberapa hari, kemudian dikeringkan, bila kita ingin membuatnya supaya tahan dimakan beberapa hari, atau langsung kita masak tanpa mengeringkan terlebih dahulu. Makanan ini kalau salah cara membuatnya, dapat mematikan karena racunnya. Makanya selama pendudukan Jepang di Enrekang, sering kita dengar nalangoi sikapa (diracun sikapa). Makanan sikapa ini sering dimakan orang di Kampung Cendana, bahkan sekarang makanan ini masih sering dimakan masyarakat di daerah Anggeraja Enrekang, terutama orang-orang yang sudah lanjut usia (mungkin sudah terbiasa dibawa dari masa penjajahan).

Untuk sayur-sayuran, masyarakat hanya boleh memasak terutama dari daun kelor. Sayuran dari kacang-kacangan tidak diperbolehkan. Polisi urusan pertanian akan memberikan laporan kepada tentara Jepang apabila melihat ada tanaman kacang-kacangan terutama sekali kacang merah. Oleh karena itu, bila masyarakat mempunyai kacang merah pasti akan menyimpannya dengan rapi agar tidak diketahui oleh tentara Jepang. Jika masyarakat ingin membuat sayur dari kacang merah, maka mereka memasaknya dengan sembunyi-sembunyi, terkadang pintu rumahnya ditutup rapat-rapat menjaga kemungkinan agar tidak diketahui oleh tentara Jepang (wawancara dengan Palisuri di Enrekang, 30 April 2003).

Untuk kebutuhan pakaian tidak ada, terutama masyarakat yang tinggal di pegunungan-pegunungan. Mereka hanya memakai penutup badan yang terbuat dari kulit pohon kayu, yang dikupas dari batangnya kemudian dibuat sedemikian rupa untuk dijadikan penutup badannya. Cara seperti ini bukan hal baru bagi mereka karena kehidupannya memang demikian ketika itu.

Bagi penduduk yang tinggal di kota-kota, seperti Enrekang, Cakke, Paaran, Maiwa, Kalosi dan sebagainya umumnya sudah memakai pakaian walaupun dalam jumlah yang sangat terbatas. Penduduk pada saat itu bukannya tidak mempunyai uang untuk membeli apa yang mereka butuhkan, tetapi apa yang bisa dibeli jika setiap barang yang akan dipasarkan selalu dihadap oleh tentara Jepang.

4. Masa Revolusi Fisik Hingga Terbentuknya Kabupaten Enrekang

4.1. Sekitar Proklamasi Kemerdekaan

Kehadiran kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat bukanlah suatu hal yang hadir dan diterima begitu saja, akan tetapi ia lahir sebagai suatu proses perjuangan yang berkesinambungan untuk mewujudkan makna hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Hal ini juga dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 1 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan pernyataan keinginan bangsa Indonesia membebaskan diri dari penjajahan. Dalam sejarah perjuangan bangsa yang sempat kita warisi, masih terekam berbagai peristiwa masa lalu yang menjadi pertanda usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para pendahulu yang patut kita ketahui.

Di daerah Enrekang setelah berita proklamasi diketahui para pemuda segera melakukan pembentukan kekuatan pendukung kemerdekaan. Tokoh-tokoh pergerakan dan pemuda di daerah Enrekang yang pernah dilatih Jepang tampil menjadi pelopor, demikian pula kaum bangsawan Enrekang dan seluruh lapisan masyarakat ikut terpanggil mempertahankan kemerdekaan sebagaimana di daerah lain, pada awal kemerdekaan tidak luput dari kegembiraan. Akan tetapi setelah Belanda muncul kembali, beberapa dari mereka

berbalik bekerjasama dengan memakai nama lain yaitu NICA (Nederland Indies Civil Administration).

Mengenai berita-berita Proklamasi di daerah Enrekang masih tumpang-tindih sehingga membuat pemuda-pemuda semakin waspada. Di sisi lain sudah ada berita bahwa Negara Republik Indonesia berada dalam cengkeraman sekutu yang berhasil menaklukkan fasisme Jepang di seluruh Asia Tenggara. Masyarakat Sulawesi Selatan dan Tenggara pada saat itu memusatkan perhatiannya sekitar berita proklamasi kemerdekaan, namun tetap mengantisipasi kedatangan musuh.

Sebelum gubernur Sulawesi Dr. Ratulangi menyampaikan secara resmi Berita Proklamasi itu, beberapa pemuka masyarakat Enrekang yang cukup akrab dengan orang Jepang telah mengetahui berita tersebut. Ada yang mendengar langsung dari radio, ada pula dari pemberitaan tidak resmi. Keadaan seperti itu hampir di semua kota kecil di Sulawesi, seperti Pare-pare, Rappang, Palopo, dan kota-kota lainnya. Sejak itulah muncul berbagai kelompok sebagai wadah atau pusat kegiatan pemuda-pemuda pendukung kemerdekaan seperti :

- Pemuda di kota Makassar dan sekitarnya
- Pemuda di kota Pare-Pare dan sekitarnya
- Pemuda di Palopo dan sekitarnya (Sarita Pawiloy, 1987:76)

Sementara pusat-pusat kegiatan dan kemampuan setiap organisasi ditata, maka terdengarlah berita resmi tentang Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia melalui harian *Pewartas Celebes* pada tanggal 29 Agustus 1945 selanjutnya Gubernur Sulawesi Dr. Ratulangi menunjuk beberapa orang ke daerah-daerah untuk menyampaikan berita resmi tersebut. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan tentang utusan-utusan yang bergerak ke daerah-daerah sebagaimana yang

dimuat dalam Arus Revolusi 45 di Sulawesi Selatan antara lain: Dr.Ratulangi mengadakan perjalanan ke Pare-Pare, terus ke Watangpone . Di daerah Wajo dan Luwu dikirim A.N. Harajati yang meneruskan langsung perjalanan ke Poso. Daerah-daerah sebelah selatan Makassar dikunjungi Lanto Daeng Pasewang , mulai dari Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai. Setelah merampungkan perjalanan di wilayah selatan, Lanto Daeng Pasewang yang gesit dan ulet menuju ke wilayah utara. Bersama dengan AN . Harajati, Lanto Daeng Pasewang menemani Andi Burhanuddin dan Andi Mandacingi di Pangkajene Kepulauan. Kemudian Pada awal September meneruskan perjalanan ke Pare-Pare menemui Andi Abdullah Bau Massepe dan Andi Makkasau, yang menjadi tokoh utama SUDARA (Sumber Darah Rakyat) menjadi pelopor menyebarluaskan berita Proklamasi. Dari Pare-Pare yakni di daerah Suppa, Pinrang kemudian diteruskan ke Mandar serta Majene kemudian selanjutnya ke seluruh pelosok daerah-daerah dalam wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Dengan tersebarnya berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia secara resmi, maka serempak di seluruh pelosok Sulawesi Selatan secara keseluruhan menyambut dengan gembira. Semula mereka membentuk kelompok antar tetangga membicarakan tentang kemerdekaan ini yang kemudian menjadi kelompok yang lebih besar yakni kelompok berdasarkan kampung dan desa mereka masing-masing. Setelah lahir kelompok-kelompok tersebut, mereka belum dapat bergerak secara terorganisasi mengingat mereka belum ada kesepakatan mengenai siapa yang akan menjadi pimpinan. Akhirnya Dr. Ratulangi mengambil inisiatif dengan membentuk suatu wadah perjuangan dengan nama

Badan Pusat Keselamatan Rakyat disingkat BPKR. Memang secara nasional Dr. Ratulangi dianggap cukup kuat namun pengaruhnya terbatas pada kaum intelektual saja dan bahkan belum menyebar dalam masyarakat luas. Di samping itu masyarakat sudah memperoleh kesempatan dan dukungan yang sama yaitu mempertahankan kemerdekaan bangsa yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 (Hamid Aly, tanpa tahun hal: 4).

Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di daerah Enrekang, cepat tersebar ke seluruh pelosok daerah-daerah. Penyampaian berita Proklamasi Kemerdekaan ini disebarluaskan oleh tokoh-tokoh pemuda pada saat itu seperti: Abdul Rahman Lambogo, Puang Tobalu, dan Puang Roe.

Dengan adanya berita Proklamasi ini, maka pemuda dan rakyat pada umumnya menyambut dengan perasaan haru dan lega. Di mana-mana terdengar pekikan merdeka mengumandang serta menjadi salam di setiap pertemuan. Lambang merah putih, mulai tampak, baik yang terpasang di dada baju, peci atau songkok para pemuda maupun pada setiap rumah-rumah pendukung kemerdekaan (wawancara dengan H. M. Saleh Mallapa, di Enrekang, 2 Mei 2003).

4.2. Masa Kedatangan Sekutu/NICA dan Pembentukan Organisasi Perjuangan Rakyat

Tentara sekutu yang bertugas menduduki daerah Sulawesi Selatan diwakili oleh kesatuan tentara Australia. Dengan satu batalyon kesatuan dari Brigade ke-21 yang mulai mendarat di Makassar pada tanggal 21 Desember 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Iwan Daugherty. Bersama tentara Australia membonceng pula NICA (Netherlands Indies Civil Administration) di bawah pimpinan Mayor J.G. Wegner.

Sebelumnya tentara Inggris dan Belanda telah mengadakan suatu persetujuan bersama yang dinamakan Civil Affairs Agreement. Persetujuan ini memberikan peluang bagi Belanda untuk melakukan kegiatan pemerintahan, setelah Jepang dipulangkan ke negerinya. Pada hal di Indonesia telah dibentuk pemerintahan baru berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan. Realisasi Civil Affairs Agreement melahirkan NICA, yang akan mengambil alih tugas-tugas administrasi pemerintahan dari Jepang di bawah komando sekutu. Setelah negeri Belanda agak pulih dari kerusakan akibat serangan dan pendudukan Jepang, sedikit demi sedikit didatangkan pasukan Belanda ke Indonesia guna membantu NICA dalam tugas sehari-hari. Hal inilah yang membuat curiga bangsa Indonesia terhadap sekutu. Dan setelah jelas benar bahwa sekutu telah diboncengi Belanda, rakyat bangkit melawannya. Bentrokan fisik pun tak dapat dihindari walaupun dari kedua belah pihak tidak seimbang (Sarita Pawiloy, 1987: 110-111).

Di Sulawesi Selatan rakyat bangkit menyusun kekuatan karena sekutu memberi kesempatan kepada NICA mempersenjatai bekas KNIL (Koninklijk Negerlandsche Leger), yang pernah disekap oleh Jepang awal Oktober 1945. Tindakan sekutu ini sesungguhnya telah diperhitungkan oleh pemimpin pemuda militan. Sebelum sekutu mendarat di Pelabuhan Makassar, Manai Sophian diminta untuk berunding dengan pimpinan Jepang dalam hal penyerahan senjata, namun tidak demikian halnya yang terjadi. Beliau amat dekat dengan Dr. Ratulangi yang cenderung pada perjuangan diplomasi ketimbang perjuangan atau perlawanan bersenjata. Sikapnya ini dapat dipahami berhubung dengan kenyataan-kenyataan yang ada pada pemuda yang tidak memiliki senjata

yang riil, serta latihan yang jauh lebih sempurna dibandingkan dengan pasukan sekutu.

Meskipun Dr. Ratulangi kurang menyetujui perlawanan bersenjata tanpa sepengetahuannya para pemuda menyusun dan membentuk kekuatan perlawanan. Pembentukan kekuatan bersenjata, walaupun saat itu persenjataan relatif amat kurang dimiliki, pemuda militan muncul di mana-mana di pelosok Sulawesi Selatan termasuk daerah Enrekang (wawancara dengan H. Ibrahim Lamada di Enrekang, 30 April 2003).

Setelah tentara sekutu tiba di Makassar dan diterima baik oleh Dr. Ratulangi, sesuai dengan pembicaraan sebelumnya di Makassar bersama wakil sekutu Mayor Gibson, seorang tawanan perang. Namun dalam kenyataan tentara Sekutu tidak konsekuen dalam menjalankan tugas, sebab kedatangan mereka bukan saja untuk melucuti senjata tentara Jepang dan memelihara keamanan serta ketertiban akan tetapi mereka juga membantu Belanda untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah-daerah. Ternyata maksud sekutu ini cepat diketahui oleh para pemuda di daerah Enrekang, karena mereka selalu mengadakan hubungan dengan tokoh-tokoh yang ada di Makassar.

Beberapa bulan menjelang sebelum tentara memasuki daerah Enrekang, para pemuda pejuang seperti Abdul Rahman Kulau, Abu Bakar Lambogo dan Hamid Aly mengadakan kunjungan dari kampung yang satu ke kampung yang lain dalam wilayah Enrekang. Tujuan kunjungan ini adalah untuk menyerukan kepada masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan, karena diperkirakan Belanda akan kembali ke daerah Enrekang. Di setiap kampung yang didatangi para pemuda berjuang bersama pengikutnya dengan semangat yang menggebu menyatakan bahwa mereka akan menentang

kedatangan Belanda atau NICA.

Sementara itu dari Pare-Pare datang Andi Makkasau memimpin rombongan Pemuda Nasional Indonesia, tujuan utama kedatangan mereka di daerah Enrekang adalah dalam rangka untuk memperkuat persatuan dalam satu wadah yang terorganisir. Adapun tujuan utama mereka dalam wadah ini adalah untuk melawan musuh yang berusaha merongrong kemerdekaan. Rapat koordinasi dilakukan dalam kota Enrekang. Disepakati bersama bahwa musuh tetap dihormati sepanjang tidak membantu Belanda atau NICA kembali ke Pare-Par pada akhir Januari 1946 (LVRI, tanpa tahun, hal: 2).

Kecuali mengadakan hubungan dengan Pare-Pare dan Palopo, para pemuda pejuang di daerah Enrekang mengutus anggota pemuda ke Polombangkeng. Yang mendapat tugas ini adalah M. Sadik dan Hamid Maluku, dan pada saat itu yang menjadi tenaga inti di Polombangkeng adalah Yanci Raib yang berasal dari kelompok pelajar dan Heiho.

Pasukan sekutu yang berangkat dari Pare-Pare baru tiba pada tanggal 12 Januari 1946, sehari sebelum Sekutu masuk daerah Enrekang telah diadakan rapat konsolidasi yang dipimpin oleh Abdul Rahman. Inti pembicaraan mereka ialah bagaimana usaha pemuda membendung masuknya NICA/ Belanda. Mereka memperkirakan musuh akan berusaha memutuskan untuk mengadakan pertahanan di Kotu, 15 Kilometer di sebelah utara Kota Enrekang.

Pada tanggal 14 Januari 1946 dengan kekuatan yang tidak seimbang para pejuang dengan gagah berani menyerbu konvoi NICA yang akan menuju ke Kampung Kotu, yaitu tempat pertahanan pemuda-pemuda pejuang. Serangan ini mengakibatkan di pihak lawan beberapa orang yang

gugur dan luka-luka. Sejak pertempuran Kotu, para pemuda sering terlihat dalam kontak senjata dan insiden lainnya melawan musuh. Sambil bertempur mereka juga mengadakan konsolidasi kekuatan yang merupakan ciri khas perlawanan gerilya (sarita Pawiloy, 1987: 183-184).

Pembentukan organisasi perjuangan rakyat setempat yang dibentuk untuk membendung kembalinya Belanda/ NICA untuk memerintah, dirintis menjelang pertengahan bulan September 1945, di Kota Enrekang. Nama organisasi perjuangan tersebut adalah PNI (Pemuda Nasional Indonesia), dengan struktur dan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua	: Abdul Rahman Kulau
Wakil Ketua	: Abubakar Lambogo
Sekretaris	: Muh. Thala
Wakil Sekretaris	: Sagimun
Kepala Perlengkapan	: Patunrungi dan Manganre
Kepala Penerangan	: Palewai, Bambang, Uwa Hame dan P. Tandang
Kepala Penghubung	: Umar P. Hafsah
Kepala Pelatih	: M. Jabir MT. Taufan, Palisuri, Abdul Madjid dan Pawennai
Kepala Pertempuran	: Yanci Raib M. Amin Cando Tamero Bura dan Puang Roe

(Sarita Pawiloy, 1987 : 181)

Satu bulan setelah pembentukan wadah ini, maka diadakan konsolidasi untuk menyempurnakannya. Penduduk

di wilayah daerah pedalaman dikunjungi guna diberikan pengertian kemerdekaan serta bahaya akan masuknya kembali kaum penjajah. Tidak ada unsur pimpinan yang tinggal diam, seluruhnya menjadi juru penerang disamping tugas pokoknya sesuai struktur organisasi. Hasil kerja mereka menyebabkan tokoh masyarakat tidak hanya memperkuat kekuatan pendukung Republik Indonesia, tetapi juga mempersempit ruang gerak tentara Sekutu. Beberapa tokoh adat terkemuka didudukkan dalam struktur PNI sebagai penasehat atau anggota kehormatan antara lain misalnya Puang Tobalu, Puang Tambone, Imam La Hajja dan lain-lainnya.

Tujuan utama dari pembentukan PNI ini adalah untuk mempersatukan seluruh potensi massa/politik guna menghadapi kekuatan Belanda bila masuk kembali ke Kota Enrekang. Selain itu pula PNI bertujuan untuk mempersatukan kelaskaran yang berada di daerah Enrekang guna pembentukan pendukung pertahanan Pemerintah RI, setelah jelas oleh rakyat bahwa di Jakarta oleh Bung Karno dan Bung Hatta sejak tanggal 17 Agustus 1945 telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Dari sinilah muncul dalam diri para pejuang kemerdekaan di daerah Enrekang dan sekitarnya kesadaran yang tinggi bahwa perlu adanya suatu wadah organisasi untuk menampung aspirasi rakyat agar dapat terkoordinir dengan baik. Di Maiwa (masih dalam wilayah Enrekang) yang berbatasan dengan Rappang PNI terbentuk pada tanggal 10 Oktober 1945, karena NICA mulai menyusup hendak mengganggu ketentraman rakyat, wadah ini segera dirubah menjadi Laskar Pemberontak Pemuda Maiwa yang disingkat PPM. Perubahan ini hampir bersamaan dengan pembentukan

Laskar Ganggawa di Rappang (LVRI tanpa tahun hal: 2).

Pada tanggal 27 September 1944 dibentuk pula BPRI (Badan Perjuangan Rakyat Indonesia) oleh Abubakar Lambogo, Andi Babba, dan Husain di rumah Andi Babba di Kampung Bamba. Laskar BPRI pada waktu itu dengan cepat melebarkan sayapnya ke kampung-kampung Duri dan Maiwa. Dengan terbentuknya organisasi ini maka era perjuangan secara terorganisir mulai dilancarkan untuk membendung kekuatan NICA atau Belanda (wawancara dengan H. M. Saleh Malappa di Enrekang, 2 Mei 2003).

Dengan terbentuknya PNI dan BPRI, maka pada tanggal 6 Februari 1946 tentara NICA dengan aksinya mulai bertindak menangkap pemimpin-pemimpin organisasi pejuang yang ada di Enrekang, di antaranya adalah Haji Ibrahim, Abdul Gafar Bustaman, Abdul Majid dan masih banyak lagi pemimpin-pemimpin lainnya. Setelah melakukan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin itu, organisasi PNI tidak dapat lagi bergerak dengan leluasa. Dengan demikian yang bertahan hanyalah BPRI yang pada saat itu langsung memperkuat organisasinya dengan jalan mundur ke hutan untuk bergerilya dan mencari kerjasama dengan laskar-laskar Ganggawa/BPRI di daerah lain (wawancara dengan Palisuri di Enrekang, 29 April 2003).

Pada bulan Juli 1946, oleh Abubakar Lambogo, Andi Babba dan Husain pengurus BPRI menyepakati untuk menugaskan Hamid Aly untuk segera masuk hutan bergerilya menyusun kekuatan untuk melatih anggota-anggota laskar lainnya di luar Enrekang. Sedangkan dalam kota ditempatkan anggota-anggota pada badan penyelidikan NICA untuk mengetahui rencana-rencana tindakan tentara-tentara Belanda.

Pada bulan Agustus 1946, mulailah Laskar BPRI Enrekang bergerak dengan mengadakan penghadapan lalu lintas tentara NICA dan melempari granat tangan tangsi tentara NICA di Randangan di bawah pimpinan Hamid Aly dengan hasil yang memuaskan di pihak kita, di mana dipihak Belanda ada beberapa yang luka-luka dan kerusakan pada tangsi-tangsi mereka. Oleh karena keadaan sudah sangat mengkhawatirkan dan adanya laporan dari beberapa anggota tentang rencana-rencana tindakan tentara Belanda, maka pada tanggal 22 September 1946 jam 7 pagi Abubakar Lambogo, Andi Babba dan Husain meninggalkan Kota Enrekang menggabungkan diri dengan pasukan di Garege sekitar 15 Km di luar Kota Enrekang. Untuk memperkuat pasukan-pasukan yang sudah ada di luar kota, maka sebelum meninggalkan kota terlebih dahulu mereka menginstruksikan kepada anggota-anggota lainnya agar mengirim beberapa orang laskarnya di Kubu Garege oleh Hamid Aly diserahkan pimpinan kembali kepada Abubakar Lambogo dan disusun kembali stafnya sebagai berikut :

Ketua : Abubakar Lambogo

Kepala Siasat : Andi Babba

Kepala Persenjataan/ : Husain

Perlengkapan

Kepala Tata Usaha : Hamid Aly

Merangkap bagian pertempuran

Untuk penyelidikan di Kota Enrekang diperkuat oleh Umar P. Hafsah dibantu oleh Nassa, M. Noer dan beberapa kepala-kepala kampung, di antaranya Kepala Kampung Talaga dan Kepala Kampung Kabere. Perlu diketahui pula bahwa sejak bulan Juni 1946 pasukan KNIL, selalu mengamati gerakan Umar P. Hafsah dan kawan-kawannya yang pada saat

itu wilayah gerak mereka di sekitar Kota Enrekang. Di bagian barat Enrekang mereka juga membuat gelisah pasukan KNIL (Hamid Aly, tanpa tahun hal: 2).

Dalam bulan Oktober 1946 di bagian utara Enrekang Andi Sose dan P. B. Harahap membentuk kesatuan laskar Harimau Indonesia (H.I) Bambapuang. Wilayah operasinya sampai masuk wilayah Tana Toraja dan Polewali Mamasa. Pucuk pimpinan dipegang oleh Andi Sose, dan beberapa kali mengadakan kontak senjata dengan Pasukan NICA yang sedang mengadakan aksinya (wawancara dengan Palisuri di Enrekang, 29 April 2003).

Dua bulan setelah terbentuknya laskar Harimau Indonesia, tepatnya bulan Desember 1946 para pemuda pejuang melancarkan penghadangan-penghadangan lalu lintas kepada tentara NICA di daerah Kabere, sehingga pada tanggal 19 Desember 1946 tentara NICA mulai beraksi menyerang kubu kita dan mengadakan perlawanan sambil mengundurkan diri ke daerah Letta Sawitto. Di kedua belah pihak tidak ada korban kecuali asrama yang ditinggalkan dibakar oleh tentara NICA (Hamid Aly, tanpa tahun hal : 7).

Sekitar tanggal 25 Desember 1946, kubu kita diserang lagi dan sempat mengadakan perlawanan walaupun hanya sebentar saja. Perlawanan ini dipimpin oleh Andi Babba. Pada saat itu Hamid Aly dan Abubakar Lambogo sedang mengadakan patroli. Bulan Januari 1947 Hamid Aly bersama dengan Husain ditugaskan menemui Andi Selle Mattola yang menurut berita di Kirasa Karrang karena ada pendaratan dari Jawa.

Setelah kembali mereka berhasil membawa sebuah Kareben, satu buah bren Jepang dengan beberapa granat buatan Indonesia kiriman Andi Selle Mattola. Tanggal 22

Januari 1947 untuk mengkoordinir laskar-laskar yang telah tersebar di daerah Sulawesi Selatan, maka diadakan Konferensi Paccekke di daerah Kewedanan Barru yang menghasilkan terbentuknya Resimen Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (T.R.I.P.S) di bawah pimpinan Andi Selle Mattoala. Sedianya yang akan diangkat sebagai komandan (panglima) TRIPS adalah Andi Abdullah Bau Massepe, akan tetapi karena beliau pada saat itu ditangkap oleh tentara Belanda sehingga berhalangan untuk hadir dalam konferensi dan beliau hanya diwakili oleh Andi Mattalatta sebagai pembawa mandate dari Jenderal Sudirman. Untuk daerah Massenrempulu termasuk Enrekang diberi status satu kesatuan Batalyon yang dipimpin oleh Abubakar Lambogo yang pada saat itu juga menjabat sebagai pimpinan BPRI Enrekang.

Ketika pelantikannya, Abubakar Lambogo berhalangan hadir dan diwakili oleh Hamid Aly, Husain dan Ahmad. Begitu juga dengan pimpinan Harimau Indonesia (Andi Sose) yang memiliki persenjataan riil berhalangan hadir. Beliau diwakili oleh Andi Tambone dan Ahmad. Sesudah konferensi tersebut Hamid Aly bersama rombongan Andi Selle Mattola, M. Saleh Lahade, Andi Paramajeng yang berjumlah 300 orang ke daerah Masserempulu yaitu Kampung Garege dengan maksud untuk mengadakan Konferensi II di Latimojong. Hal ini tidak dapat berlangsung karena musuh selalu dapat mencium rencana-rencana itu sehingga mereka selalu mengikuti dari belakang rombongan sampai ke Kampung Tembang (Enrekang). Hal lain yang menyebabkan gagalnya konferensi tersebut adalah karena gangguan dari operasi tentara NICA di sekitar tempat pertemuan (LVRI, tanpa tahun, hal: 14).

Pada tanggal 28 Januari 1947, Kolonel Saleh Lahade

Kepala Staf Devisi TRI Masserempulu dengan pangkat Kapten TRI. Sesudah pelantikan itu, Kapten Hamid Aly sebagai wakil komandan/Kepala Staf Batalyon I Masserempulu menyerahkan formasi kepada Kepala Staf Devisi TRI Hasanuddin juga kepada Komandan Resimen I TRI Devisi Hasanuddin. Adapun susunan dari formasi Batalyon I TRI Masserempulu Resimen I Devisi Hasanuddin tersebut adalah sebagai berikut :

- I. 1. Komandan Batalyon : Abubakar Lambogo (Kapten TRI)
2. Wakil Komandan : Hamid Aly (Kapten TRI)

II. Staf Batalyon

1. Kepala Staf : Hamid Aly (Kapten TRI)
2. Perwira Seksi I : Bung Piet (Lettu TRI)
3. Wakil Pasi I : Muhammad (Letda TRI)
4. Perwira Seksi II : Jarullah (Lettu TRI)
5. Wakil Pasi II : Paca S (Letda TRI)
6. Perwira Seksi III : Husain (Lettu TRI)
7. Wakil Pasi III : Azis Benden (Letda)
8. Perwira Seksi IV : M. Aly (Lettu TRI)
9. Wakil Pasi IV : Muh. Amin (Letda)

III. Kompi-Kompi TRI Batalyon I Massenrempulu

1. Kompi I/ Duri
 - a. Komandan Kompi : E. Tambone (Lettu TRI)
 - b. Wakil Komandan : Tambaru (Letda)
2. Kompi II/Enrekang
 - a. Komandan Kompi : Andi Babba (Lettu TRI)
 - b. Wakil Komandan : Bagenda Ali (Letda TRI)
3. Kompi III/Maiwa

- a. Komandan Kompi : Andi Manyullei (Lettu TRI)
- b. Wakil Komandan : Andi Pakkonteng (Letda TRI)
- 4. Kompi IV/Sawitto Utara
 - a. Komandan Kompi : P. Dalle (Lettu TRI)
 - b. Wakil Komandan : A. Sappaile (Letda TRI)
- 5. Kompi V/Polmas Selatan
 - a. Komandan Kompi : Mongolia (Lettu TRI)
 - b. Wakil Komandan : Nyempa (Letda TRI)

(Hamid Aly, 1986 : 88-89)

4.3. Perlawanan Bersenjata di Daerah Enrekang

Perlawanan bersenjata di daerah Massenrempulu akan diuraikan sesuai waktu terjadinya pertempuran dalam wilayah Kabupaten Enrekang yang secara menyeluruh meliputi lima kecamatan, yakni Kecamatan Maiwa, Enrekang, Baraka, Anggeraja, dan Alla. Peristiwa pertempuran tersebut adalah sebagai berikut :

4.3.1. Pertempuran di Kotu

Pada tanggal 14 Januari pukul 06.00 pos pengintai pemuda melaporkan, bahwa iring-iringan oto NICA/Belanda mendekati Kotu. Pasukan Belanda berjalan kaki mengintai oto, sambil berjaga-jaga. Gerak maju pasukan Belanda agak pelan memberi kesempatan kepada pihak pemuda pejuang memperbaiki posisi. Ketika itu pimpinan laskar yang mengatur pertempuran masing-masing : Cando, Imam Kotu, Samaun, Puang Roe, Umar P, Hafsah, dan Yanci Raib. Strategi pertempuran dan pemegang komandan pasukan bersenjata dipercayakan kepada orang Jepang yang telah menjadi laskar : Abdul Rasyid (Yasiro Kikuci).

Tidak kurang dari 400 yang ikut dalam pertempuran.

Pukul 06.30 ledakan granat pemuda membuka serangan kemudian segera disusul oleh tembakan Kareben. NICA atau Belanda telah menduga, segera mencari perlindungan dan membalas serangan Batu Alam yang dionggokkan digelindingkan, namun musuh telah menjauh dari sasaran. Tembak-menembak berlangsung selama 3 jam. Persenjataan Belanda terlalu kuat dibanding yang dimiliki pemuda. Karena itu pihak pemuda menderita korban yang cukup banyak. Empat di antaranya gugur yaitu : Bareng, Sattu, Yatim, dan Abdul Rasyid. Beberapa orang lagi menderita luka-luka. Setelah kontak senjata Imam Kota bersama 13 orang lainnya tertangkap. Pasukan Belanda melanjutkan operasi pencarian di sekitar lokasi pertempuran. Namun pemuda telah mengundurkan diri ke pegunungan batu, menyeberang ke kampung lainnya. Tiga orang laskar berusaha menuju Polombangkeng, dekat Kota Makassar. Ketiga pemuda itu : Cando, Yanci Raib, dan kemudian menyusul M. Jabir. Mereka telah cukup lama membina hubungan dengan pemuda pejuang di Polombangkeng dan sekitarnya. Beberapa pejuang asal Enrekang ikut ke Polombangkeng, ketika pemuda mundur dari Kota Makassar dalam bulan Oktober 1945 (Sarita Pawiloy, 1987: 290 - 291).

4.3.2. Pertempuran di Batu Ke'de Sekitar Cakke

Laskar di bawah pimpinan Wa'lija, yang berkekuatan sekitar 20 orang dengan 3 pucuk senjata jenis karaben menghadang musuh. Sepasukan polisi Belanda melakukan patroli dan dihadang oleh laskar sehingga terjadi tembak-menembak. Kontak senjata berlangsung selama 1 jam, dengan taktik pancingan terhadap musuh. Sambil menembak laskar mengundurkan diri ke sela-sela bukit berbatu, dengan tujuan

polisi Belanda mengejar laskar. Mungkin musuh mengetahui taktik itu, sehingga mengakhiri tembakan (Sarita Pawiloy, 1987 : 291).

4.3.3. Pertempuran di Cendana, Sossok

Kontak senjata kali ini, terbilang cukup seru. Laskar terdiri dari beberapa kelaskaran, tergabung dalam Komando Abubakar Lambogo dan Andi Singkang. Kekuatan laskar gabungan itu ada sekitar 150 orang, dengan 8 pucuk karaben. Pihak musuh ialah pasukan NICA atau Belanda, 2 peleton yang dipimpin oleh Kapten Bloumen. Meskipun kekuatan musuh melebihi laskar, namun laskar mampu memukul mundur mereka. Agaknya pasukan NICA belum mampu menyesuaikan diri dengan kondisi alam Enrekang. Sesudah bertempur selama 2 jam, pasukan NICA mengundurkan diri. Sebagaimana biasanya sesudah kontak senjata, tentara NICA melakukan penangkapan disertai penyiksaan terhadap penduduk (Sarita Pawiloy, 1987:292).

4.3.4. Pertempuran di Kollong Buttu

Pada tanggal 20 Maret 1946, terjadi pertempuran di Kollong Buttu, yang letaknya 12 kilometer sebelah selatan Kota Enrekang. Para pemuda pejuang dari laskar BPRI mengadakan kontak senjata dengan patrol NICA/Belanda, di bawah pimpinan Muhammad dan Paca dengan kekuatan satu regu pasukan. Di dalam pertempuran itu tiga buah granat tangan yang dilepaskan, dua buah tepat mengenai sasaran musuh yang dilemparkan oleh Kasiren dan Pajala : Pasukan Belanda segera meninggalkan lokasi pertempuran menuju Kampung Pudukku, yang kurang lebih 800 meter dari tempat kejadian. Dalam pertempuran ini pasukan NICA/Belanda sudah tidak

ada perlawanan karena semuanya terluka parah dan mati kecuali supirnya. Oleh karena itu laskar yang terdiri saudara Muhammad, Kasiren, Babasa, Pajala, Daming, Pajalakka dan lain-lainnya menuju ke Kampung Pudukka untuk merampas senjata Belanda, sementara laskar mendekat dengan penuh kewaspadaan, dengan tiba-tiba datang bantuan tentara NICA/ Belanda dari Kota Enrekang yang dipimpin oleh Kapten Bloumen. Dengan demikian terpaksa laskar mengundurkan diri dan semua kembali dengan selamat.

Pada malam harinya sesudah pertempuran itu, Babasa dan Pajala berangkat ke Enrekang mengantar surat dari Hamid Aly untuk Abubakar Lambogo, setelah beliau membaca surat tersebut, maka Abubakar Lambogo mengucapkan selamat dalam melaksanakan tugas perjuangan. Lebih lanjut Abubakar Lambogo menyatakan bahwa peristiwa pertempuran tersebut itu cukup menggemparkan di Enrekang. Sesudah itu Babasa dan Pajala kembali ke Kampung Garege pada malam itu juga, dengan membawa penyampaian dari Abubakar Lambogo untuk Hamid Aly, yaitu ucapan terima kasih dan selamat berjuang dan semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa (Hamid Aly, 1986 : 39-40).

4.3.5. Pertempuran di Kulinjang

Pertempuran di Kulinjang terjadi pada tanggal 20 April 1946 dengan kekuatan laskar sebanyak satu regu di bawah pimpinan Baco Bure dibantu oleh P. Lacce mnegadakan serangan terhadap NICA/Belanda yang bergerak dari arah Kota Enrekang menuju ke Kalosi. Para pemuda melemparkan dua buah granat tangan yang langsung mengenai sasaran. Pertempuran terjadi, namun laskar terpaksa mengundurkan diri ke jurusan barat menuju ke Kampung Tungga karena

dengan cepat bantuan tentara NICA datang dari kota Enrekang yang tak jauh dari tempat terjadinya pertempuran, lalu mengejar para laskar yang telah mengundurkan diri, setelah sampai di daerah pegunungan di pinggir sungai menuju Desa Penja, tempat laskar BPRI bertahan. Medan pun dikuasai oleh para laskar sehingga tentara NICA/Belanda terpaksa kembali dan berjalan kaki menuju Kota Enrekang yang jaraknya kurang lebih 6 km dari tempat kejadian (Hamid Aly, 1986:42).

4.3.6. Pertempuran di Kollong Buttu Ke II

Pada tanggal 12 Juli 1946 sekitar pukul 09.00 BPRI mengadakan pertempuran di Kollong Buttu, yaitu daerah yang terletak di antara Baba dan Kabere, di bawah pimpinan Pajala dan Muhammad dengan kekuatan dua regu pasukan. Laskar BPRI mengadakan pertempuran dengan tentara NICA dengan kekuatan dua mobil yang lengkap dengan pasukannya. Pasukan Belanda yang terdiri dari dua mobil tersebut, terdiri dari sebuah truk dan sebuah jeep. Pada truk itu memuat dua regu tentara Belanda lengkap dengan persenjataannya. Sedangkan pada mobil jeep yang ditumpangi oleh Kapten Westerling lolos dari pertempuran dan langsung ke Enrekang meminta bantuan. Tidak lama kemudian datang dua truk bantuan Belanda. Tetapi bantuan ini tidak sampai berhadapan dengan laskar BPRI. Laskar telah jauh ke timur di balik pegunungan yang meninggalkan tempat pertempuran setelah berhasil melepaskan beberapa butir peluru dari empat pucuk senjata dan setelah melemparkan dua buah granat di antara delapan buah yang dibawa oleh para laskar itu. Dengan kegagalan tentara Belanda pada pertempuran tersebut, menyebabkan mereka menggiring semua rakyat yang tak

bersalah di sekitar tempat kejadian, dibawa ke Maroangin untuk dihabisi atau ditembak mati (Hamid Aly, 1986:51).

4.3.7. Kontak Senjata Pimpinan Nenek Runa

Dalam bulan Agustus 1946, antara Kalosi dan Cakke, kelompok Wa'lija menyerang patroli NICA dua kali berturut-turut. Patroli NICA dihadang dan terjadi kontak senjata selama setengah jam. Pemuda mengundurkan diri, taktik yang sering mereka gunakan guna memancing musuh. Benar juga patroli mengejar laskar. Di tempat yang ditetapkan, laskar menghadang lagi. Karena kehabisan peluru, terjadi pertempuran bersosok, satu lawan satu. Dalam duel perorangan, musuh memusatkan perhatian mereka kepada Nenek Runa, pimpinan penyerangan. Nenek Runa ditangkap dan dibunuh dengan cara yang amat menyedihkan dengan cara kepalanya dipisahkan dari badannya. Badan tanpa kepala dipertontonkan di sekitar lokasi pertempuran, sedangkan kepala tanpa badan dibawa ke Kalosi, sejak bulan April 1946 Kota Kalosi tetap dikuasai sepenuhnya oleh NICA (Sarita Pawiloy, 1987:292).

4.3.8. Pertempuran Cendana II

Markas laskar di Cendana mengganggu pikiran Kapten Bloumen, Komandan Tentara Belanda di Kota Enrekang. Dalam bulan September 1946, untuk kedua kalinya, Bloumen memimpin serangan ke markas Cendana. Kontak senjata terjadi antara dua pleton tentara Belanda melawan sekira 50 orang laskar pimpinan Wa'lija dan Andi Singkang. Dua orang laskar gugur dalam insiden bersenjata itu.

Abubakar Lambogo bersama pasukannya amat sering muncul di Cendana. Hal itu menambah kekuatiran pasukan

Belanda di Kota Enrekang (Sarita Pawiloy 1987:292).

4.3.9. Pertempuran Pasukan HI yang Pertama

Usaha Konsolidasi laskar selalu dilakukan oleh pimpinan pemuda Massenrempu. Demikian dilakukan dalam bulan September 1946. Namun hubungan antar laskar kurang sempurna menyebabkan terjadi hambatan kecil. Maka kadang-kadang dipaksakan adanya struktur kepemimpinan gabungan laskar yang kurang memuaskan semua pihak. Keadaan itu mendorong Andi Sose membentuk laskar Harimau Indonesia (HI) di Enrekang bagian utara. Ia bekerjasama dengan PB. Harahap bekas Heiho sekitar bulan Oktober 1945. Laskar HI dibentuk oleh Andi Sose berdasarkan mandate dari HI pusat di Pangkajene Kepulauan pimpinan Muhammad Syah.

Beberapa hari saja setelah laskar HI terbentuk, Andi Sose melakukan operasi imbalan terhadap musuh. Pasukannya dua kali terlibat pertempuran dengan patroli aparat NICA dalam bulan Oktober 1946. Yang pertama di Talimbangan distrik Banti, dengan kekuatan satu regu bersenjata keraben 5 pucuk. Dalam kontak senjata itu, pimpinan HI, Andi Sose nyaris tertawan musuh, akibat pertarungan terlalu dekat. Kelompok laskar III kekuatan satu regu lainnya bergerak ke daerah Maiwa atas. Di Tallong Riaja bertemu patroli NICA dan terjadi kontak senjata (Sarita Pawiloy, 1987:292).

4.3.10. Pertempuran di Randangan

Kekuatan laskar sekitar Kota Enrekang dipersatukan ke dalam BPRI, dipimpin oleh Abubakar Lambogo dan Hamid Aly. BPRI pada umumnya melakukan operasi di sekitar Kota Enrekang. Tembang (Buttu Batu) menyusur ke perbatasan Sawitto serta Maiwa. Patroli pasukan Hamid Aly berusaha

mengimbangi kegiatan tentara NICA, agar musuh tidak terlalu jauh masuk ke pedalaman. Di Kampung Randangan pasukan BPRI pimpinan Hamid Aly menyerang patroli NICA. Tetapi berhubung musuh terlalu kuat maka kontak senjata hanya sekitar satu jam. Tidak ada korban kedua belah pihak. Sesudah pertempuran Oktober 1946 patroli NICA mengoperasi penduduk, merampas harta rakyat dan melakukan penangkapan terhadap penduduk yang dicurigai. Para pejuang yang tertangkap, dibawa ke Maroangangin. Tanpa melalui proses pengadilan beberapa orang di antaranya dibunuh oleh aparat NICA (sarita Pawiloy, 1987:293).

4.3.11. Pertempuran di Jembatan Baje dan Gunung Tancung

Gunung Tancung, yang ditempati latihan laskar di bawah instruksi Andi Manyukki TRIPS yang datang dari Jawa, cukup berhasil membawa para pejuang. Pada bulan Desember 1946 disepakati melakukan uji coba materi latihan, dengan penghadangan di Jembatan Baje. Pimpinan dipegang oleh Hamid Maluku. Sementara mengatur posisi tiba-tiba muncul sebuah truk berisi orang-orang berseragam militer. Di dalam truk itu kelihatan lebih banyak preman dari tentara. Pimpinan operasi membuang tembakan ke arah oto, yang segera diikuti anggota laskar. Tentara bersama rakyat di atas oto berhamburan keluar dan melarikan diri. Laskar berusaha mencari mereka di semak-semak karena diduga mereka bersembunyi.

Pada malam harinya, dari kota Enrekang datang Kapten Bloumen membawa dua pleton pasukan. Kendaraan mereka menuju ke lokasi Gunung Tancung. Karena itu laskar pimpinan Hamid Maluku yang membawa senjata, tidak berada di markas ketika musuh tiba. Markas hanya dikawal oleh dua pucuk karaben dan sepuluh butir granat dengan kekuatan

personil sebanyak kurang lebih 40 orang. Laskar berusaha menghindari kontak senjata langsung. Markas dikosongkan sehingga ketika tentara Belanda mencapai Gunung Tancung tidak ditemukan seorangpun di tempat itu.

Pimpinan laskar Letnan saru TRI Andi Mayulei mempersiapkan penyerangan. Dalam perjalanan pulang melalui sela-sela batu besar, tentara NICA disergap. Tiga orang tentara NICA ditewaskan karena terkena pecahan granat, kelihatan jatuh masuk jurang. Sayang senjata amat kurang, karena sebagian besar masih dibawa rombongan Hamid Maluku. Pada pihak laskar tidak ada yang korban. Setelah sejam terjadi kontak senjata singkat, tentara Belanda mengusung anggotanya yang tewas kembali ke Kota Enrekang.

Markas dan tempat latihan Gunung Tancung terpaksa dikosongkan oleh laskar, kemudian pindah ke Bulu-Bulu. Baru saja pindah ke Bulu-Bulu, Andi Sose datang untuk menemui Andi Mayulei. Diharapkan pasukan TRIPS pimpinan Andi Mayulei menjalin kerjasama. Daerah Duri dijamin sebagai tempat untuk melakukan konsolidasi dan persiapan serangan terhadap posisi musuh. Semula pimpinan H. Andi Sose belum dikenal. M. Sadik yang pertama kali menjumpainya, bahkan ragu namun sesudah ditunjukkan tanda pengenal yaitu kartu HI, barulah diperkenankan bertemu dengan Andi Mayulei. Kemudian pimpinan TRIPS dan HI Bambapuang terjalin kerjasama, bahkan sejumlah besar pasukan bersama TRIPS menyertai Andi Sose ke daerah Duri. M. Sadik ikut pula ke daerah Duri, ia diberi tugas memimpin satu pleton bagian dari pasukan HI melakukan perjalanan non stop dari Bulu-Bulu ke daerah Duri, lewat rute yang sulit dilalui dan mereka tiba 24 jam kemudian.

Penambahan kekuatan mendorong Andi Sose untuk

melakukan pukulan terhadap musuh di Kalosi, yaitu kota kecil yang dijadikan sarang Belanda. Beberapa tokoh masyarakat di tempat itu, telah diperalat musuh, sehingga tidak ada salahnya jika diserang dengan kekuatan sehingga yang agak besar ke kota Kalosi tersebut. Tanggal penyerangan telah ditetapkan, yakni pada tanggal 10 Januari 1947. Puang Intang salah seorang tokoh terkemuka memberikan dukungannya. Semua pasukan penyerang berintikan HI telah dipersiapkan. Kepada setiap kelompok ditetapkan letak stelling dalam formasi pengepungan Kota Kalosi. Personil telah dipersiapkan pula sebanyak kurang lebih 400 orang. Di antara pasukan penyerang itu, terdapat barisan berani mati, berintikan laskar HI bersenjata api, dan anggota TRIPS. Tinggal penetapan jam serangan yang belum ditentukan, tiba-tiba datang utusan Maiwa, membawa surat Andi Mayulei, isinya tentang akan adanya pertemuan laskar di Sulawesi Selatan di pedalaman Pare-Pare karena pasti Andi Sose diundang oleh pemegang mandat Andi Mattalatta diharapkan agar pasukan TRIPS anak buah Mayulei yang menggabung pada Andi Sose, dibawa sendiri oleh pimpinan HI ke medan konferensi, maka serangan ke Kota Kalosi ditunda. Padahal sekelompok anggota Polisi yang bertugas di Kalosi telah bersedia ikut bertempur di pihak laskar, setelah letusan komando dibunyikan (Sarita Pawiloy, 1987:294-295).

4.3.12. Pertempuran di Sekitar Osso

Pada tanggal 25 Desember 1946, tentara NICA berkekuatan satu kompi dibawah pimpinan Kapten Bloumen mengadakan lagi operasi dan menjadi sasarannya ialah BPRI di sekitar Osso. Tentara NICA bergerak dari tiga jurusan yaitu dua regu dari Baka ke Osso, dua regu dari pasang ke Osso, Kapten Bloumen dan lainnya dari Maseмба ke Osso.

Sementara itu BPRI dua pleton di bawah pimpinan Pajala, Kamidi dan Pajalakka menghadang tentara NICA yang bergerak dari Baka ke Osso. Sekitar jam 11 siang lewatlah Tentara NICA dalam keadaan kurang waspada, saat inilah digunakan oleh pihak laskar BPRI dengan melemparkan beberapa buah granat tangan ke arah sasaran. Karena tentara NICA panik sehingga lari sekitar dua ratus meter baru berhenti bertahan. Mereka lalu mengadakan penembakan terhadap laskar BPRI. Akhirnya laskar BPRI mengundurkan diri ke gunung Tapong. Sesudah itu Belanda menangkap dua orang rakyat lalu mereka dibawa ke Enrekang untuk dipenjarakan. Pada malam harinya laskar BPRI kembali ke posnya di Gunung Osso sekitar tiga km di sebelah timur kampung Osso (Hamid Aly, 1986 : 79).

4.3.13. Pertempuran di Langga Tallu Karrang

Pada tanggal 29 Desember 1946, diadakan lagi pertempuran di Langga Tallu Karrang, Enrekang. Pertempuran tersebut dipimpin oleh Pajala dan Kassa Bolong dengan kekuatan satu pleton laskar BPRI. Pertempuran dilancarkan sekitar jam 10.00 siang terhadap sebuah jeep dan sebuah truk tentara NICA dengan kekuatan dua regu yang mengawal Kapten Bloumen dari Enrekang menuju Pare-Pare. Dalam pertempuran di Langga Tallu Karrang, dua buah granat tangan yang dilemparkan oleh Kassa Bolong sebuah di antaranya mengenai jeep Kapten Bloumen dan meledak. Sedangkan sebuah granat tangan yang dilemparkan oleh Pajala tepat kena pada truk Belanda lainnya, setelah itu semua tentara Belanda mengundurkan diri sekitar seratus meter barulah melepaskan tembakan terhadap laskar BPRI. Disamping itu pula laskar mengundurkan diri ke jurusan timur dan melanjutkan kembali ke pangkalan masing-masing karena kekurangan peluru. Dalam pertempuran ini kedua

belah pihak tidak ada yang cedera. Sedangkan Kapten Bloumen dan anak buahnya melanjutkan perjalanan menuju Pare-Pare (Hamid Aly, 1986 : 80).

4.3.14. Pertempuran di Sekitar Sossok

Guna memenuhi undangan ke Konferensi Paccekke, rombongan laskar Enrekang berangkat ke tempat itu, lebih dahulu tiba rombongan Hamid Aly, langsung bergabung dengan rombongan Andi Selle. Sedangkan rombongan HI Bambapuang pimpinan Andi Sose bersama dengan persekutuan TRIPS harus berhadapan patroli musuh. Di Sossok pertengahan Januari 1947, pasukan pimpinan Andi Sose bertempur melawan patroli NICA. Kontak senjata berlangsung selama dua jam, namun kedua pasukan yang bertempur itu sama-sama ingin mengakhiri pertempuran. Rombongan Andi Sose ingin cepat sampai di Medan konferensi. Meskipun rombongan HI bergegas-gegas mereka belum juga tiba pada saat konferensi dilaksanakan. Ketika itu rombongan pemegang mandat telah bergerak ke arah Maiwa, mengakhiri jebakan musuh (Sarita Pawiloy, 1987 : 295).

4.3.15. Pertempuran di Buttu Batu

Batalyon Masserempulu TRIPS hasil Konferensi Paccekke segera kembali ke daerah operasinya, setelah usai pertempuran. Pasukan NICA semakin mempersempit ruang gerak laskar, sehingga para pejuang hanya bergerak dalam pedalaman agak jauh ke pedalaman. Pada awal Februari 1947, rombongan Abubakar Lambogo tiba di Buttu Batu. Ikut pula dalam rombongan, M. Saleh Lahade sengaja ke daerah Masserempulu untuk meresmikan kesatuan-kesatuan laskar TRIPS. Rombongan besar tersebut diikuti terus oleh para

penyelidik NICA. Laporan penduduk selalu masuk bahwa pasukan NICA telah sering kelihatan mendekat ke posisi TRIPS. Pada saat pertempuran, diputuskan melakukan perhitungan dengan musuh yang selalu membayangi gerakan rombongan laskar, pada tanggal 10 Februari 1947, formasi penghadangan disiapkan. Komando pertempuran dipegang oleh Hamid Aly. Menurut catatan sekitar 30 pucuk senjata berbagai jenis akan digunakan dalam pertempuran dan jumlah personil sekitar 500 anggota. Lokasi pertempuran disiapkan melalui tentara NICA. Ketika tentara NICA masuk dalam formasi pertempuran, kontak senjata dimulai. Dua pleton NICA terpaksa bekerja keras mengimbangi seerangan gencar laskar. Pertempuran berlangsung dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 siang. Pasukan NICA dan laskar TRIPS sama-sama mengundurkan diri. Dalam gerak mundur rombongan yang diikuti Andi Selle dan M. Saleh Lahade menuju Pasui melalui Sossok, pada tanggal 13 Februari 1947.

Setelah Belanda kembali ke Kota Enrekang, maka tentara NICA mulai melakukan lagi penangkapan. Mbo Empat pejuang tertangkap : Katanni, Ambo Lele, Ambo Tiung dan Lenong. Mereka di bawah ke Maroangin dan dibunuh, Arung Enrekang Andi Muhammad Tahir ikut tertangkap, untung baginya dapat lolos dari pembunuhan, karena ditahan di Kota Maros (Sarita Pawiloy, 1987 : 296).

4.3.16. Pertempuran di Salu Wajo dan Maiwa

Sesudah kontak senjata di Buttu Batu, sebagian laskar TRIPS/BPRI menuju wilayah Maiwa, sebelumnya pada tanggal 18 Februari 1947 di Kampung Uru diadakan suatu rapat yang sangat dirahasiakan. Hadir pada pertempuran itu antara lain : M. Saleh Lahade, Andi Selle Mattola, Andi

Babba, Abubakar Lambogo dan beberapa orang lainnya di mana pada saat itu dibicarakan mengenai keberangkatan mereka ke Jawa untuk mengadakan hubungan dan meminta bantuan. Tanggal 20 Februari 1947 rombongan yang membawa persenjataan berangkat ke Tanete untuk bertemu dengan Letnan Andi Mayulei untuk mengadakan pembicaraan agar pasukan Andi Mayulei dengan BPRI selalu berdekatan untuk menggampangkan saling bantu-membantu dalam tiap gerakan pembelaan, bila mendapat serangan dari tentara Belanda. Esoknya rombongan kembali ke tempat Andi Selle, tetapi tujuan dirubah ke Kampung Kaluppini daerah Enrekang karena mendapat berita bahwa pasukan Andi Selle dan Andi Sose diserang di daerah tersebut. Pada tanggal 13 Maret 1947 rombongan tadi bertemu dengan rombongan Andi Selle di Kampung Salu Wajo daerah Maiwa dan mengadakan pertemuan agar supaya besok semua rombongan berangkat menuju Suppa. Besoknya rombongan Andi Selle Mattola dan M. Saleh Lahade meninggalkan tempat itu, tetapi rombongan yang lain tidak dapat meninggalkan tempat karena Abubakar Lambogo tiba-tiba sakit. Dengan tidak disangka-sangka rombongan tersebut mendapat serangan dari tentara Belanda. Dengan demikian tidak dapat mengadakan perlawanan sebab musuh datang secara tiba-tiba. Hal ini membuat rombongan terpecah dan banyak di antara mereka yang gugur, seperti Abubakar Lambogo pimpinan BPRI, serta Dawiru isteri Andi Babba dan dua orang anggota Batalyon IV dari Mandar. Sebelum Abubakar Lambogo dibunuh terlebih dahulu beliau disiksa di luar batas-batas perikemanusiaan pada lazimnya kalau yang tertangkap itu seorang komandan, maka mereka akan merawat dan memberikan perlindungan, namun lain

halnya dengan yang dilakukan terhadap Abubakar Lambogo. Setelah ditangkap kepala beliau dipenggal dan terpisah dari badannya. Kepala tanpa badan itu dibawa tentara Belanda ke Enrekang sebagai bukti. Kepala tersebut digantung di pintu gerbang Pasar Enrekang selama sehari semalam. Pada waktu itu semua anak buahnya dipaksa untuk mencium kepala pimpinannya itu. Badannya dikuburkan di tempat penembakan dan ditanam bersama dengan pejuang lain yang gugur. (LVRI, tanpa tahun, hal : 4 – 5).

4.4. Terbentuknya Kabupaten Enrekang

Daerah Enrekang (Masserempulu) sebelum terbentuk menjadi kabupaten, maka berturut-turut mengalami perubahan bentuk pemerintahan :

- Menurut sejarah pada mulanya Kabupaten Enrekang adalah merupakan suatu kerajaan yang besar bernama Malempong Bulan, kemudian kerajaan ini bersifat Tomanurung yang terdiri atas 7 kawasan kerajaan yang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Pitu Masserempulu yang meliputi : Endekan, Kassa, Batulappa, Duri, Maiwa, Letta, dan Baringin. Tujuh kawasan kerajaan ini muncul kira-kira abad ke XIV, kemudian kerajaan tersebut pada abad XVII berubah menjadi lima kerajaan yaitu : Endekan, Duri, Maiwa, Kassa, dan Batu Lappa. Berhubung karena politik Belanda yang memecah belah kerajaan tersebut, maka kerajaan Kassa dan Batulappa dimasukkan ke Sawitto ini terjadi pada tahun 1905, sehingga untuk tetap pada keadaan lima Masserumpulu tersebut, maka kerajaan-kerajaan yang ada di dalamnya adalah Endekan, Maiwa, Alla, Buntu

Batu dan Malua.

- Pada masa penjajahan Belanda sejak tahun 1912 sampai dengan 1941, bentuk pemerintahannya berubah kembali menjadi Onder Afdeling yang dikepalai oleh seorang Kontroleur (Tuan Petoro).
- Pada masa pendudukan Jepang sejak tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 bentuk pemerintahannya berubah kembali dari Onder Afdeling menjadi Kanrikan dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Bunker Kanrikan.
- Pada masa NICA, NIT tahun 1946 sampai tanggal 27 Desember 1949, bentuk pemerintahan di daerah Masserempulu menjadi Onder Afdeling Enrekang.
- Kemudian sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai tahun 1960 kawasan Masserempulu berubah mejadi Kewedanan Enrekang dengan pucuk pimpinan pemerintahan disebut Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang (KPN Enrekang), yang meliputi lima Swapraja yakni : Swapraja Enrekang, Swapraja Alla, Swapraja Buntu Batu, Swapraja Malua, dan Swapraja Maiwa.

Adapun mantan Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang (KPN Enrekang) adalah :

1. Abdul Hakim
2. Abdul Rahman, BA
3. Abdul Madjid Pattaropura
4. Nuhung
5. Atjo

Kemudian yang menjadi catatan atau lembaran sejarah yang tak dapat dilupakan, bahwa dalam perjuangan atau pembentukan kewedanan Enrekang atau Kabupaten

Masserempulu (ingat bahwa yang disetujui kelak dengan nama Kabupaten Dati II Enrekang, mungkin karena latar belakang historisnya).

Adapun pernyataan / resolusi tersebut :

1. Pernyataan partai / Ormas Masserempulu di Enrekang pada tanggal 27 Agustus 1956.
2. Resolusi panitia penuntut Kabupaten Masserempulu di Makassar pada tanggal 18 Nopember 1956 yang diketuai oleh Almarhum Drs. H. M. Risa.
3. Resolusi HIKMA di Pare-Pare pada tanggal 29 Nopember 1956.
4. Resolusi Raja-Raja (Arum Parpol/Ormas Masserumpulu di Kalosi pada tanggal 14 Desember 1956).

Di antara tokoh-tokoh/Sejarah Masserumpulu yang memelopori terbentuknya Kabupaten Enrekang antara lain :

1. Drs. H. M. Risa
2. Drs. H. M. Thala
3. H. Andi Santo
4. Palisuri
5. H. M. Yasin
6. Andi Maraintang
7. Andi Baso Nur Rasyid
8. Andi Tambone
9. Bompeng Rilangi
10. Andi Enreng
11. Abdul Rahman, BA

Berdasarkan PP No. 34 Tahun 1962 dan Undang-Undang NIT Nomor 44 tahun 1960 Sulawesi terpecah dan sebagai pecahannya meliputi administrasi (Afdeling) Pare-

Pare yang lebih dikenal dengan nama Kabupaten Pare-Pare lama di mana Kewedanan Enrekang adalah merupakan salah satu daerah di antara lima kewedanan lainnya. Selanjutnya dengan keluarnya undang-undang nomor 29 tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 74) tentang pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi atau daerah Swatantra Tingkat II (DASWATI II), maka Kabupaten Pare-Pare terpecah menjadi 5 (lima) DASWATI II antara lain :

1. DASWATI II Enrekang
2. DASWATI II Sidenreng Rappang
3. DASWATI II Barru
4. DASWATI II Pinrang
5. DASWATI II Pare-Pare

(Kelima gabungan daerah tersebut dari dulu dikenal dengan nama Afdeling Pare-Pare).

Dengan terbentuknya DASWATI II Enrekang berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, maka sebagai tindak lanjut pada tanggal 19 Februari 1960 dilantik Sdr. A. H. Babba Mangoppo sebagai Bupati yang pertama dari hari terbentuknya DASWATI II Enrekang atau Kabupaten Enrekang berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan ditetapkannya Perda No. 4, 5, 6 dan No. 7 tahun 2002 Tanggal 20 Agustus 2002 tentang pembentukan 4 (empat) Kecamatan Definitif, sehingga pada saat ini Kabupaten Enrekang telah menjadi 9 (sembilan) kecamatan yang definitif antara lain :

1. Kecamatan Enrekang
2. Kecamatan Maiwa

3. Kecamatan Anggeraja
4. Kecamatan Baraka
5. Kecamatan Alla
6. Kecamatan Curio
7. Kecamatan Bungin
8. Kecamatan Malua
9. Kecamatan Cendana

Selanjutnya dari 9 (sembilan) kecamatan definif terdapat 108 Desa/Kelurahan, yang terdiri 12 Kelurahan dan 96 Desa dan jumlah penduduk sebanyak 171.578 jiwa orang.

Sebelum kita mengartikan makna gambar dan lambang Masserumpulu, ada baiknya kita menoleh pada mulanya terbentuknya Kabupaten Enrekang yang telah mengalami beberapa kali pergantian Bupati sampai sekarang antara lain :

1. Periode 1960 – 1963 dijabat oleh Andi Babba Mangopo
2. Periode 1963 – 1964 dijabat oleh M. Nur
3. Periode 1964 – 1965 dijabat oleh M. Chatif Lasiny
4. Peride 1965 – 1969 dijabat oleh Bambang Soetresna
5. Periode 1969 – 1971 dijabat oleh Abdul Rachman, BA
6. Periode 1971 - dijabat oleh Drs. A. Parawansa (Pjs)
7. Periode 1971 – 1978 dijabat oleh Muh. Daud
8. Periode 1978 – 1983 dijabat oleh Abdullah Dollar, BA
9. Periode 1983 – 1988 dijabat oleh M. Saleh Nurdin Agung
10. Periode 1988 – 1993 dijabat oleh M. Amin Syam
11. Periode 1993 – 1998 dijabat oleh Andi Rachman
12. Periode 1998 – sekarang dijabat oleh Drs. H. Iqbal Mustafa

Pelantikan Bupati Enrekang yang pertama tepat pada tanggal 19 Februari 1960 yang juga menjadi hari terbentuknya Daerah Kabupaten Enrekang. Kemudian tidak adillah bila

kita tidak menyebut para mantan pimpinan Daerah di bidang Legislatif (DPR) sampai sekarang antara lain :

1. Andi Babba Mangopo (merangkap Bupati karena msih DPR GR).
2. Abdul Rahman, BA
3. H. Arifin Ali
4. Mahatmantong
5. M. Jafar
6. Ibrahim Taqwa
7. H. M. Mien Kamase
8. Jamaluddin Tanti
9. M. Saleh Nurdin Agung
10. H. M. Samad Mannan
11. H. M. Ali Rahim
12. H. J. K. Sawati (periode 1999-2004)

(sumber : Kantor Bupati Enrekang Tahun 2003)

Lambang Daerah dan Maknanya

Adapun lambang daerah Kabupaten Enrekang berbentuk perisai dengan dasar ungu bergaris pinggir hitam dan di dalamnya terdapat lukisan (keterangan gambar lambang Masserempulu).

1. Bagian atas bintang sudut lima berwarna kuning di atas satu bidang segi lima dasar hitam.
2. Di bawah keris dan kelewang terhunus bersilang ke atas berwarna merah tua.
3. Di tengah-tengah dua gunung kehijau-hijauan, perkebunan, persawahan dan sungai.
4. Di bawah lima cincin berantai yaitu dua ungu, dua hijau dan satu kuning yang menghubungkan padi di

sebelah kiri dan kopi pada kanan yang masing-masing melengkung ke atas.

5. Di bagian bawah pita hitam dasarnya dengan tulisan letter putih "Masserempulu".

Makna Lambang

1. Perisai dasar ungu melambangkan adalah diambil dari gelaran Manurung Enrekang "LAKAMUMMU yang berarti ungu karena Enrekanglah mendapat kehormatan sebagai ibu kota dari lima kerajaan-kerajaan kecil federasi tadi (sekarang ibu kota Enrekang) dari ibu kota inilah mencerminkan keseluruhan Masserempulu.
2. Lima cincin berantai melambangkan sejarah pemerintahan Masserempulu Panca Tunggal, dulu lima Swapraja, dan lima kecamatan induk.
3. Warna-warna cincin melambangkan sejarah bahasa daerah Masserempulu yaitu tiga kecamatan bahasa Duri, satu bahasa Enrekang dan satu bahasa Maiwa. Bahasa mana karena memang dari dari satu rumpun, bisa dimengerti oleh seluruh rakyat di wilayah ini.
4. Warna hitam yang terdapat pada lukisan ini melambangkan bahwa warganya adalah sederhana di segala bidang.
5. Keris dan kelewang melambangkan pusaka nenek moyang yang dianugerahkan Yang Maha Kuasa pada ke lima kerajaan-kerajaan tadi dan digelar "Manurung" (tiap-tiap kerajaan tadi mempunyai gelaran tersendiri-sendiri), juga menggambarkan kepahlawanan warganya sejak dahulu kala dan menjadi pusaka turun-temurun.

Masserempulu adalah daerah yang mempunyai sejarah dan kepribadian tersendiri. Masserempulu jika dijalin dalam

bahasa Bugis Massinring Bulu ataupun Mabbiring Bulu, artinya sebagian desanya terletak di kaki-kaki bukit/seakan-akan bersandar di kaki gunung, demikian bentuk sehingga terciptalah julukan "Masserempulu". Pengertian kiasan di atas diciptakan suatu lambang yang menggambarkan alam keseluruhannya, dari warganya, ekonominya maupun sejarah budaya, politiknya dan lain-lain.

Adapun arti dan makna dari pada lambang Kabupaten Enrekang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kekayaan rakyatnya dilambangkan oleh bintang sudut lima yang artinya bahwa rakyat Masserempulu pada umumnya beragama Islam.
2. Bintang sudut lima juga melambangkan kehidupan rakyatnya penuh dengan cita-cita tinggi yang berlandaskan Pancasila.
3. Padi dan kopi melambangkan kemakmuran, kerukunan dan kesejahteraan yang didambakan masyarakat.

Di dalam lambang Enrekang tersebut dan tersiratlah angka-angka keramat bagi kita bangsa Indonesia yaitu :

1. Gambar biji padi sebanyak 28
2. Gambar daun kopi sebanyak 11
3. Gambar biji kopi sebanyak 45
4. Jumlah gambar sebanyak 8

Kesimpulan : $28 - 11 = 17$, jadi $17 - 8 = 45$

(Sumber : Kantor Bupati Kabupaten Enrekang Tahun 2003)

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1.1. Federasi Masserempulu yang meliputi lima kerajaan masing-masing berdiri sendiri, yaitu Kerajaan Enrekang, Maiwa, Batulappa, Kassa dan Duri. Duri juga adalah federasi yang terdiri dari Kerajaan Malua, Alla dan Buntu Batu yang populer disebut Tallu Batu Papan. Dari lima kerajaan tersebut di atas, maka yang tertua adalah Kerajaan Enrekang yang berdiri pada kira-kira abad ke XV Masehi dan didirikan oleh seorang wanita bernama Takkebuku.
- 1.2. Mengenai struktur pemerintahan pada lima kerajaan tersebut itu hampir sama di mana setiap kerajaan diperintah oleh seorang raja yang diberi gelar Arung didampingi oleh Sullewatang dan Pabbicara. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh raja atas kesepakatan dari Dewan Kerajaan. Setelah agama Islam masuk dan diterima sebagai agama resmi kerajaan, maka mempengaruhi struktur pemerintahan terdahulu, di mana golongan agama (sara') disejajarkan kedudukannya dengan golongan adat (ada') di dalam kehidupan masyarakat. Para pejabat sara' mengatur urusan upacara-upacara keagamaan seperti Maulid,

Isra' dan Mi'raj, sholat Ied di Istana Raja. Mereka sangat berperan dalam urusan pernikahan raja-raja dan kaum bansawan lainnya, serta penyelenggaraan upacara-upacara kematian raja dan pembesar kerajaan.

- 1.3. Pada tanggal 1 Maret 1906, Mayor de Wijs sendiri tiba di Enrekang. Dia berhasil membujuk Arung Enrekang Ratu Pancaitana dengan perantaraan suaminya La Patiroid Arung Soreang untuk menandatangani perjanjian pendek pada tanggal 4 Maret 1906. Sejak itulah Enrekang menjadi pusat kedudukan pemerintahan Hindia Belanda di Daerah Masserempulu, dan dari sini serangan Belanda dilancarkan untuk merebut benteng-benteng lainnya yang belum tunduk seperti Kotu, Bambapuang, Alla dan Buntu Batu di bawah pimpinan Imam La Rajja, La Gali, dan Puanna Seppu yang gigih mempertahankan benteng-benteng tersebut.
- 1.4. Setelah kemenangan di pihak pemerintah Belanda, maka daerah Masserempulu ditempatkan di bawah kekuasaan langsung dengan status Onder Afdeling, yaitu Onder Afdeling Enrekang yang merupakan bagian dari Afdeling Pare-Pare. Onder Afdeling Enrekang dibagi menjadi lima wilayah pemerintahan yang disebut *Zelft berturunde landschappen*, yaitu Enrekang, Maiwa, Alla, Buntu Batu dan Malua. Adapun Alla, Malua dan Buntu Batu dahulunya adalah Kerajaan Duri dipecah tiga oleh Belanda. Kerajaan Kassa dan Batulappa oleh pemerintah Belanda digabungkan ke dalam Kerajaan Sawitto (Onder Afdeling Pinrang).
- 1.5. Pada masa pemerintahan Jepang di daerah Enrekang / Masserempulu semua kegiatan-kegiatan pemerintahan

Belanda tidak mengalami perubahan. Tidak ada pergantian pejabat, sehingga pejabat-pejabat lokal yang dipakai pada masa pemerintahan Belanda tetap menjalankan tugasnya pada masa pemerintahan Jepang. Kalaupun terjadi pengangkatan pejabat-pejabat lokal, maka tentara Jepang tidak terlalu berperan, karena yang berperan di sini ialah hanya Tomatua-Tomatua (penasehat dalam pemerintahan) yang terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan masyarakat, karena sasaran mereka adalah urusan ekonomi untuk mempertahankan hidupnya, dan membiayai perang. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Arung / Puang dan wakilnya disebut Sullewatang, sementara yang mengurus pelaksanaan pemerintahan dan urusan peradilan disebut *Pabbicara*.

- 1.6. Di bidang kemiliteran, pemerintah Jepang mendirikan sekolah militer di Anggeraja daerah Masserempulu tepatnya di Kampung Carruk sekitar 18 kilometer arah utara Kota Enrekang. Tujuan sekolah militer ini adalah untuk menggembleng pemuda-pemuda Enrekang dalam rangka untuk menghadapi tekanan-tekanan musuh Jepang yakni pasukan sekutu. Sekolah militer yang didirikan oleh Pemerintah Jepang di daerah Enrekang / Masserempulu meliputi : pendidikan Seinendan, Seinenku-Rensho, Keibodan, Suisintai, dan Heiho. Pendidikan yang dilaksanakan ini diikuti oleh utusan-utusan dari Luwu, Enrekang, Sidrap dan Pare-Pare.
- 1.7. Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di daerah Enrekang Masserempulu, cepat tersebar ke seluruh

pelosok daerah-daerah terpencil. Penyampaian berita Proklamasi Kemerdekaan ini disebarluaskan oleh tokoh-tokoh pemuda pada saat itu seperti Abdul Rahman Kulau, Abubakar Lambogo, Puag Tobalu dan Puang Roe. Dengan adanya berita proklamasi ini, maka pemuda dan rakyat pada umumnya menyambut dengan perasaan haru dan lega. Di mana-mana terdengar pekikan merdeka mengumandang serta menjadi salam di setiap pertemuan. Lambang merah putih mulai nampak, baik yang terpasang di dada baju, peci atau songkok para pemuda maupun pada setiap rumah-rumah pendukung kemerdekaan.

- 1.8. Sebelum datangnya tentara sekutu/ NICA di daerah Enrekang Masserempulu telah berbentuk beberapa organisasi perjuangan seperti PNI (Pemuda Nasional Indonesia) dan BPRI (Badan perjuangan Rakyat Indonesia) yang dibentuk oleh pemuda-pemuda pejuang ketika itu. Tujuan utama dari pembentukan organisasi ini adalah untuk mempersatukan seluruh potensi massa /politik guna menghadapi kekuatan Belanda bila masuk kembali di daerah Enrekang Masserempulu. Selain itu pula organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan kelaskaran yang berada di daerah Enrekang guna pembentukan pendukung pertahanan pemerintah RI.
- 1.9. Dalam rangka mempetahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno Hatta, maka di daerah Enrekang Masserempulu para pemuda pejuang mengadakan perlawanan bersenjata di seluruh wilayah dalam kawasan Masserempulu seperti : pertempuran di

daerah Kotu, pertempuran di Batu Ke'de, pertempuran di Cendana, pertempuran di Kallong Buttu, pertempuran di Kulinjang dan lain-lain.

- 1.10. Kemudian pada perkembangan selanjutnya setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 29 tahun 1959 (Lembaran Negara RI No. 74 tanggal 4 Juni 1959) tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan dengan sebutan Daerah Swatantra Tingkat II di Sulawesi Selatan dengan sebutan Daerah Swatantra Tingkat II (DASWATI II), maka kabupaten Pare-Pare dibagi menjadi 5 (lima) Daerah Swatantra Tingkat II (DASWATI II) yang meliputi :

1. DASWATI II Enrekang
2. DASWATI II Sidenreng Rappang
3. DASWATI II Pinrang
4. DASWATI II Barru
5. DASWATI II Kotamadya Pare-Pare

Dengan terbentuknya DASWATI II Enrekang berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1959, maka sebagai tindak lanjut pada tanggal 19 Februari 1960 dilantik Sdr. A. H. Babba Mangoppo sebagai Bupati yang pertama dan hari terbentuknya DASWATI II Enrekang atau Kabupaten Enrekang berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan ditetapkannya Perda No. 4, 5, 6 dan 7 tahun 2002 tanggal 20 Agustus 2002 tentang pembentukan 4 (empat) kecamatan defenitif, sehingga pada saat ini Kabupaten Enrekang telah menjadi 9 (sembilan) kecamatan defenitif antara lain :

1. Kecamatan Enrekang
2. Kecamatan Maiwa
3. Kecamatan Anggeraja
4. Kecamatan Baraka
5. Kecamatan Alla
6. Kecamatan Curio
7. Kecamatan Bungin
8. Kecamatan Malua
9. Kecamatan Cendana

2. Saran

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang akan menuju pada peningkatan kualitas penelitian dan penulisannya, maka diharapkan adanya fasilitas seperti tustel, alat rekam, dan literatur yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Sejarah Lokal di Indonesia*, Gajah Mada Press. 1979. Yogyakarta.
- Aly, Hamid. *Sejarah Singkat Perjuangan Laskar Badan Perjuangan Rakyat Indonesia dan Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi Di Masserempulu Sulawesi Selatan*. Enrekang : Naskah Pribadi.
- *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Enrekang (Masserempulu) dari tahun 1945-1949*. Enrekang : Naskah pribadi, tanpa tahun.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Enrekang Tahun 2001.
- Hamid, Pananrangi. *Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng, Ujung Pandang* : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar. 1991.
- Ida Dian. *Pendudukan Jepang di Anggeraja (1943-1945)*. Skripsi Pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unhas. 1991.
- Kadri, Harun, dkk. *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*, Jakarta Depdikbud, Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah. 1978.
- *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan 1945-1950*. Ujung Pandang : Kerjasama Lembaga Penelitian UNHAS dengan BAPPEDA TK I Sulawesi Selatan. 1984.
- Karim, Saliba. *Sejarah La Rangkang Menentang Imperialisme*

Belanda Di Daerah Masserempulu, Skripsi FKIS-Ikip Ujung Pandang. 1971.

LVRI. *Rangkaian Sejarah Kelaskaran-Kelaskaran Kesatuan Badan Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara 1945-1949*. LVRI, Sulseira, Jilid I.

Mappasana, H.A. Manan. *Masserempulu Menurut Catatan D. F. Van Braam Morris* (M. Yunus Hafid, Editor), Depdikbud, Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Kajian Jarahnitra Ujung Pandang. 1991.

----- "*Kebudayaan Masserempulu Suatu Tinjauan Historis*" Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Sejarah dan Kebudayaan Masserempulu di Ujung Pandang, tanggal 18 Nopember 1989.

Makkulase, Drs. A. Haruna. "*Laporan Pengumpulan Data PSK, Kabupaten Enrekang*". Suatu Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan. 1986.

Marwati Djoened,dkk. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta : PN. Balai Pustaka, Jilid VI. 1990.

Muh. Abduh. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang, Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. 1981.

Nawir. *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Di Daerah Palopo Luwu 1945-2949*. Depdikbud : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar. 1993.

----- Inventarisasi Sumber Sejarah Pada Masa Pendudukan Jepang di Kabupaten Enrekang dan Tana Toraja. Badan Pengembangan Kebudayaan dan

- Pariwisata proyek Pengkajian dan Pemanfaatan Sejarah dan Tradisi Sulawesi Selatan (naskah belum terbit). 2002.
- Pawiloy, Sarita. *Arus Revolusi 45 Sulawesi Selatan*, Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Provinsi Sulawesi Selatan : Ujung Pandang. 1987.
- Palisuri. "Kerajaan Enrekang Dan Kepemimpinan Raja-Raja Enrekang". Makalah Disajikan Dalam Seminar nasional, Sejarah dan kebudayaan Masserempulu di Ujung Pandang tanggal 18 Nopember 1989.
- Paeni, Muhlis. *Politik Kekuasaan dan Kepemimpinan Di Desa* (Darul Islam di Masserempulu) Ujung pandang : LEPHAS. 1985.
- Sarrang, Drs. Sila. "Sejarah Singkat Maiwa". Makalah Disajikan Dalam Seminar Nasional Sejarah dan Kebudayaan Masserempulu di Ujung Pandang, tanggal 18 Nopember 1989.
- Soejiti, Irwan. *Sejarah Pemerintahan Daerah Indonesia I*. 1982. Jakarta : PT. Gramedia.
- Sagimun, MD. *Perang Sulawesi Selatan*. 1964. Panitia Museum Tugu Nasional : Jakarta.

DATA INFORMAN

1. Nama : Drs. Arman
Umur : 44 tahun
Pekerjaan : Kasubdin Objek Wisata dan
Kebudayaan Daerah Dinas
Pariwisata Kabupaten Enrekang
Alamat : Enrekang
2. Nama : Drs. H. Ibrahim Lamada
Umur : 68 tahun
Pekerjaan : Pensiunan Kepala kantor
Departemen Agama
Kabupaten Enrekang
Alamat : Enrekang
3. Nama : Drs. H. Kussian Narra
Umur : 63 tahun
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Pada
Kantor Depdikbud Kecamatan
Anggeraja Kabupaten Enrekang
Alamat : Cakke, Kabupaten Enrekang
4. Nama : Palisuri
Umur : 70 tahun
Pekerjaan : Budayawan
Alamat : Enrekang
5. Nama : H.M.Saleh Malappa
Umur : 72 tahun

Pekerjaan	: Pensiunan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Enrekang
Alamat	: Enrekang
6. Nama	: R. Patria
Umur	: 68 tahun
Pekerjaan	: Pensiunan Guru SD
Alamat	: Carruk, Kabupaten Enrekang

PENERBIT
de la macca

Jl. Borong Raya No. 75 A
Telp. 0411-2410294 - 0811 468 957
Email: gunmonoharto@yahoo.com

**GERBANG KECERDASAN
MENUJU PERADABAN
YANG LEBIH BAIK**

ISBN 978 602 263 017 3



9 786022 630173